

LAPORAN PP39

TRIWULAN IV

TAHUN ANGGARAN 2025



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50136

☎ (024) 8414811

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan IV tahun 2025 Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan IV Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun anggaran 2025 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2025 baik dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Dalam laporan ini juga memaparkan realisasi yang telah dicapai oleh Satker pada triwulan tersebut, serta pengawasan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Januari 2026


Plt. Kepala BBSPJPPI

Apit Pria Nugraha

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab. I Pendahuluan	1
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	3
1.3. Struktur Organisasi	4
Bab. II Rencana Kegiatan	6
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025	6
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	16
Bab. III Pelaksanaan Kegiatan	21
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	22
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan	74
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	84
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	84
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan.....	86
3.3. Langkah Tindak Lanjut	86
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja.....	86
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan	87
Bab. IV Penutup	88
4.1. Realisasi Kegiatan	88
4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	89
4.3. Saran dan Tindak Lanjut.....	83
Lampiran 1: Form Rencana Aksi	
Lampiran 2: Form Realisasi Rencana Aksi Triwulan IV TA 2025	
Lampiran 3: Tabel Monitoring RO Oktober-Desember 2025 (Aplikasi Smart Kemenkeu)	
Lampiran 4: APLIKASI EMONEV BAPPENAS TW IV 2025	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi :

- a Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
 - Penanganan Pencemaran;
 - Pengujian Bahan dan Barang;
 - Standardisasi Pengujian Mutu Produk.
- b Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
 - Kalibrasi Instrument
 - Kalibrasi Lingkungan
- c Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
 - Sertifikasi Sistem Mutu
 - Sertifikasi Produk
 - Sertifikasi Industri Hijau
- d Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
- e Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
 - Konsultasi Keteknikan
 - Rancang Bangun dan Rekayasa
- f Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri
 - Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
- g Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal
- h Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN /PROGRAM

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) menetapkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada periode 2025-2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2025-2029, serta Kebijakan Industri Nasional 2025-2029, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada pelaksanaan:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi,

produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan Program/Kegiatan tahunan sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung capaian target dan sasaran strategis sekaligus dukungan atas pelaksanaan Tupoksi diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan Program/Kegiatan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan beserta kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan sekaligus sebagai dasar acuan untuk menilai capaian/ realisasi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Kinerja, telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target kinerja.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, disamping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program kegiatan yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

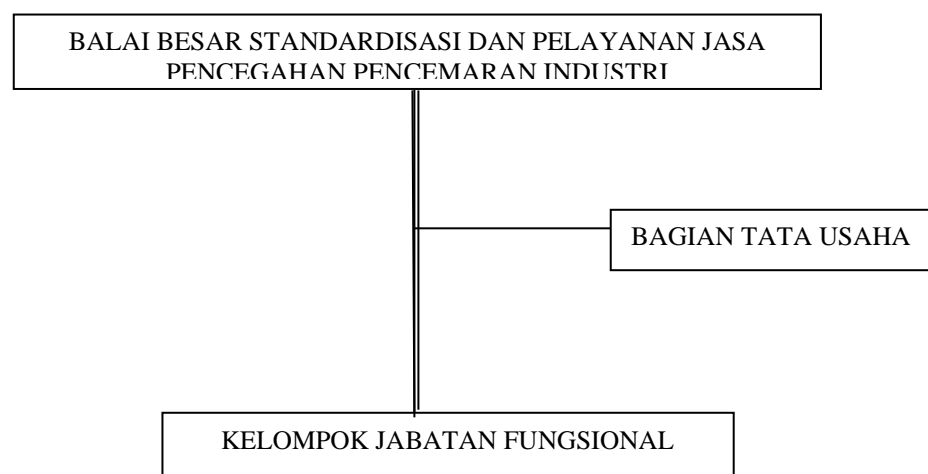
Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II , Bagian Tata Usaha

yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPI

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Ketua Tim Kerja.

BAB. II

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

2.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2025-2029, Visi BBSPJPPI adalah *"Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju dan berkelanjutan"*. Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi *"Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau"*. Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan mendukung misi BSKJI pada ciri ke 6 (Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing) dan ke 7 (Pelaksanaan tata Kelola yang baik/gppd governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien) yaitu berkontribusi dalam mendukung pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing serta pelaksanaan tata Kelola yang baik/ good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien.

Kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2025 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 36.159.131.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran di tingkat internal BBSPJPPI, telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 pada 17 Januari 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
- b. Revisi ke-2 pada 21 Februari 2025, revisi dalam rangka efisiensi anggaran BBSPJPPI Tahun 2025. Nilai efisiensi belanja BBSPJPPI TA 2025 sebagaimana ditetapkan dalam nota dinas BSKJI sebesar Rp 6.589.339.000 yang terdiri dari

- efisiensi belanja sumber anggaran Rupiah Murni sebesar Rp 1.917.839.000 dan Sumber PNB/BLU sebesar Rp 4.617.500.000. Pagu efektif BBSPJPPI Tahun 2025 sebesar Rp 29.569.792.000. Revisi ini tanpa merubah pagu.
- c. Revisi ke-3 pada 3 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi rekomposisi revisi efisiensi anggaran. Pagu anggaran tidak mengalami perubahan
- d. Revisi ke-4 pada 11 Maret 2025, dengan pertimbangan revisi adalah revisi pencantuman saldo awal.
- Besaran saldo awal BLU BBSPJPPI TA 2025 sebesar Rp. 2.937.097.225,- sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe AI Semarang I Nomor KET-3/KPN. 1401/2025 tanggal 10 Februari 2025. Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.
- e. Revisi ke-5 pada 17 April 2025, dengan pertimbangan revisi adalah pemutakhiran RPD Hal III DIPA.
- Untuk mendukung pencapaian kinerja IKPA yang optimal khususnya pada aspek perencanaan, telah dilakukan pengajuan revisi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada satker BBSPJPPI sd Triwulan III 2025.
- Pagu anggaran pada revisi ini tidak mengalami perubahan.
- f. Revisi ke-6 pada 27 Mei 2025, dengan pertimbangan revisi adalah relaksasi Blokir Kode A.
- Besaran relaksasi blokir kode A sebesar Rp. 175.815.000,- yang ditujukan untuk kegiatan layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor). Relaksasi ini menyebabkan nilai efisiensi belanja yang semula Rp. 6.589.339.000,- menjadi sebesar Rp. 6.413.524.000,-, sehingga besaran pagu efektif BBSPJPPI TA 2025 menjadi sebesar Rp. 29.745.607.000,-
- g. Revisi ke-7 pada 25 Juni 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan tanpa merubah pagu.
- h. Revisi ke-8 pada 7 Juli 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran RPD halaman III DIPA Triwulan III tanpa merubah pagu.
- i. Revisi ke-9 pada 22 Agustus 2025, revisi dalam rangka relaksasi blokir anggaran BBSPJPPI Tahap II. Dimana BBSPJPPI mendapatkan relaksasi blokir kode A tahap II sebesar Rp. 591.306.000,- yang ditujukan untuk kegiatan

- layanan kepada industri dan perjalanan dinas pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Pagu efektif anggaran menjadi Rp.30.336.913.000,-
- j. Revisi ke-10 pada 19 September 2025, revisi dalam rangka penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp.2.788.144.000,-. Revisi menyebabkan penambahan pagu anggaran pada DIPA BBSPJPPI menjadi sebesar Rp. 38.947.275.000,- dengan nilai pagu efektif anggaran sebesar Rp. 33.125.057.000,-.
 - k. Revisi ke-11 pada 1 Oktober 2025, revisi terkait pemutakhiran KPA dimana mengakomodir potensi pagu minus belanja pegawai tanpa merubah pagu.
 - l. Revisi ke-12 pada 3 Oktober 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran RPD hal III DIPA Triwulan IV tanpa merubah pagu anggaran.
 - m. Revisi ke-13 pada 10 November 2025, revisi dalam rangka relaksasi blokir anggaran BBSPJPPI TA 2025 Tahap III berdasarkan Nota Dinas Kepala BSKJI Nomor 918/BSKJI/PR/X/2025 dimana mendapatkan relaksasi blokir sebesar Rp. 879.544.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 181.148.000,- (untuk listrik) di Program Dukungan Manajemen dan dari BLU sebesar Rp. 698.396.000,- (untuk sewa GCMS) di Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Revisi ini turut mengakomodir penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.518.688.000,- yang dipergunakan untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai tahun 2025. Sehingga pagu BBSPJPPI mengalami perubahan dari semula Rp. 38.947.275.000,- menjadi Rp. 40.465.963.000,-.
 - n. Revisi ke-14 pada 17 November 2025, revisi dalam pergeseran antar KRO dalam satu satker, antar jenis belanja yang mengakibatkan penambahan volume RO secara total tanpa merubah pagu anggaran. Total pagu Rp. 40.465.963.000,- dengan nilai pagu efektif anggaran sebesar Rp. 35.523.289.000,-.
 - o. Revisi ke-15 pada 12 Desember 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran POK Kewenangan KPA tanpa merubah pagu anggaran.

Tabel 1 Pagu Anggaran Program BBSPJPPI 2025

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran 2025			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Anggaran BBSPJPPI	36.159.131.000	36.159.131.000	38.947.275.000	40.465.963.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	12.659.906.000	12.659.906.000	15.448.050.000	15.448.050.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000	12.659.906.000	15.448.050.000	15.448.050.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	557.212.000	557.212.000	662.447.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000	8.755.599.000	11.543.743.000	11.171.188.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	3.347.095.000	3.347.095.000	3.614.415.000
Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000	23.499.225.000	23.499.225.000	25.017.913.000
2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	23.499.225.000	23.499.225.000	23.499.225.000	25.017.913.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	21.072.144.000	21.072.144.000	22.582.166.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	1.474.826.000	1.474.826.000	1.474.826.000
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	700.524.000	700.524.000	712.284.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	251.731.000	251.731.000	248.637.000

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel. 2 berikut :

Tabel 2. Program/Kegiatan BBSPJPPI Tahun Anggaran 2025

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan IV		
	Pagu	Blokir	Efektif
Anggaran BBSPJPPI	40.465.963.000	4.942.674.000	35.523.289.000
Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri	15.448.050.000	2.035.944.000	13.412.106.000
1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	15.448.050.000	2.035.944.000	13.412.106.000
KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi	662.447.000	227.537.000	434.910.000
KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri	11.171.188.000	214.882.000	10.956.306.000
KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.614.415.000	1.593.525.000	2.020.890.000
Program Dukungan Manajemen	25.017.913.000	2.906.730.000	22.111.183.000
2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	25.017.913.000	2.906.730.000	22.111.183.000
KRO 1 : Layanan Dukungan Manajemen Internal	22.582.166.000	1.290.876.000	21.291.290.000
KRO 2 : Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	1.273.091.000	201.735.000
KRO 3 : Layanan Manajemen SDM Internal	712.284.000	294.006.000	418.278.000
KRO 4 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	248.637.000	48.757.000	199.880.000

Tabel 3. Klasifikasi Rincian Output dan Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran DIPA Awal (Rp)	Blokir (Rp)	Pemanfaatan Saldo Kas BLU (Rp)	Penambahan alokasi anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	227.537.000			434.910.000
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	8.755.599.000	214.882.000	2.788.144.000		10.956.306.000
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.593.525.000			2.020.890.000
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	1.290.876.000		1.518.688.000	21.291.290.000
5	6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.474.826.000	1.273.091.000			201.735.000
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	294.006.000			418.278.000
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	48.757.000			199.880.000
Total			36.159.131.000	4.942.674.000	2.788.144.000	1.518.688.000	35.523.289.000

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPPI Tahun 2025 sesuai DIPA revisi ke-15 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Anggaran BBSPJPPI Tahun 2025

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)				SD/CP
		DIPA Pagu Awal	Blokir	Penambahan Alokasi Anggaran	Efektif	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	12.659.906.000	2.035.944.000		13.412.106.000	
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	12.659.906.000	2.035.944.000		13.412.106.000	
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	557.212.000	227.537.000		434.910.000	
013	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	557.212.000	227.537.000		434.910.000	
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	285.484.000	114.375.000		186.209.000	BLU
A	Temu Pelanggan	285.484.000	114.375.000		186.209.000	
052	Publikasi Layanan Jasa Teknis	271.728.000	113.162.000		248.701.000	BLU
A	Promosi	228,696,000	94.180.000		230.251.000	
B	Pameran	43.032.000	18.982.000		18.450.000	

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)				SD/CP
		DIPA Pagu Awal	Blokir	Penambahan Alokasi Anggaran	Efektif	
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	8.755.599.000	214.882.000		10.956.306.000	
002	Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	6.390.307.000	129.294.000		8.529.552.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	6.200.577.000			8.524.552.000	BLU
A	Koordinasi Peningkatan Layanan Dan Operasional Laboratorium Pengujian	2,227,752,000			3.457.319.000	
B	Layanan Pengujian Pengendalian Pencemaran	3,202,825,000			4.315.527.000	
C	Layanan Pengujian Aneka Komoditi	770,000,000			751.706.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	189.730.000	129.294.000		5.000.000	BLU
022	Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	524.236.000	48.500.000		748.607.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	462.920.000			748.607.000	BLU
A	Layanan Kalibrasi	462.920.000			748.607.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	61.316.000	48.500.000		-	BLU
A	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	61.316.000			-	
034	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	940.140.000	37.088.000		653.979.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	714.700.000			529.936.000	BLU
A	Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	72.600.000			32.352.000	
B	Layanan Sertifikasi Produk	508.560.000			408.592.000	
C	Layanan Sertifikasi Industri Hijau	38.460.000			16.165.000	
D	Layanan Sertifikasi Manajemen Lingkungan	14.160.000			2.220.000	
E	Jasa Pelayanan Pemeriksa Halal	37.000.000			26.687.000	
F	Analisis Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri	43.920.000			43.920.000	
052	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	225.440.000	37.088.000		124.043.000	BLU
A	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi	225.440.000	37.088.000		124.043.000	
055	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	217.110.000			122.632.000	
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	217.110.000			122.632.000	BLU
A	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	217.110.000			122.632.000	
056	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Pencegahan Pencemaran Industri	28.668.000			28.668.000	
051	Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	28.668.000			28.668.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)				SD/CP
		DIPA Pagu Awal	Blokir	Penambahan Alokasi Anggaran	Efektif	
A	Layanan Verifikasi TKDN	28.668.000			28.668.000	
057	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri	462.382.000	464.762.000		841.444.000	
051	Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	367.080.000	464.762.000		748.942.000	BLU
A.	Konsultasi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek	155.190.000			97.590.000	
B	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	211.890.000	464.762.000		651.352.000	
052	Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	95.302.000			92.502.000	BLU
A.	Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	95.302.000			92.502.000	
096	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	155.668.000			31.424.000	
051	Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi	112.000.000			29.924.000	BLU
A.	Penyelenggara Uji Profisiensi	112.000.000			29.924.000	
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	43.668.000			1.500.000	BLU
A.	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	43.668.000			1.500.000	
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.347.095.000	1.593.525.000		2.020.890.000	
013	Peralatan Fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	3.347.095.000	1.593.525.000		2.020.890.000	
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	3.347.095.000	1.593.525.000		2.020.890.000	BLU
A.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	3.347.095.000	1.593.525.000		2.020.890.000	
WA	Program Dukungan Manajemen	23.499.225.000	2.906.730.000		22.111.183.000	
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	23.499.225.000	2.906.730.000		22.111.183.000	
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.072.144.000	1.290.876.000		21.291.290.000	
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	333.528.000	230.000.000		103.528.000	
051	Pengelolaan Data dan Informasi	333.528.000	230.000.000		103.528.000	BLU
A.	Pengelolaan Data dan Informasi	333.528.000	230.000.000		103.528.000	
962	Layanan Umum	73.958.000			65.292.000	
051	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	73.958.000			65.292.000	BLU
A.	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	73.958.000			65.292.000	
994	Layanan Perkantoran	20.664.658.000	1.060.876.000		21.122.470.000	
001	Gaji dan Tunjangan	14.982.432.000		1.518.688.000	16.501.120.000	RM
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14.647.771.000		1.230.493.000	15.878.264.000	

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)				SD/CP
		DIPA Pagu Awal	Blokir	Penambahan Alokasi Anggaran	Efektif	
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	334.661.000		288.195.000	622.856.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.682.226.000	1.060.876.000		4.621.350.000	RM/BLU
A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	3.191.858.000	1.004.657.000		2.055.551.000	RM/BLU
B	Langganan Daya Dan Jasa	916.200.000	2.414.000		790.276.000	RM/BLU
C	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor	717.570.000			960.289.000	RM/BLU
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	271.540.000	53.805.000		217.735.000	RM/BLU
E	Pemeliharaan Alat Laboratorium	225.000.000			247.416.000	BLU
F	Pemeliharaan Sarana Kantor	106.258.000			96.163.000	RM/BLU
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	199.800.000			199.800.000	BLU
H	Penyelenggaraan Poliklinik	54.000.000			54.120.000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1.474.826.000	1.273.091.000		201.735.000	
951	Layanan Sarana Internal	674.826.000	473.091.000		201.735.000	
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	35.000.000	35.000.000		0	RM
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	298.266.000	298.266.000		0	RM
053	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	341.560.000	139.825.000		201.735.000	BLU
971	Layanan Prasarana Internal	800.000.000	800.000.000		0	
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	800.000.000	800.000.000		0	BLU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	700.524.000	294.006.000		418.278.000	
954	Layanan Manajemen SDM	256.252.000	203.064.000		35.871.000	
051	Pengelolaan/Manajemen SDM	256.252.000	203.064.000		35.871.000	RM/BLU
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	444.272.000	90.942.000		382.407.000	
051	Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	444.272.000	90.942.000		382.407.000	
A	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN	60.160.000			28.435.000	BLU
B	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional	28.990.000			7.055.000	BLU
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	355.122.000	90.942.000		346.917.000	RM/BLU
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	251.731.000	48.757.000		199.880.000	
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	45.906.000			45.906.000	
051	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	45.906.000			45.906.000	BLU
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.061.000			44.061.000	
051	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	44.061.000			44.061.000	BLU
955	Layanan Manajemen Keuangan	129.620.000	22.728.000		103.798.000	
051	Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	129.620.000			103.798.000	RM/

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)				SD/CP
		DIPA Pagu Awal	Blokir	Penambahan Alokasi Anggaran	Efektif	
						BLU
961	Layanan Reformasi Kinerja	32.144.000	26.029.000		6.115.000	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP	32.144.000			6.115.000	BLU

2.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, untuk mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBSPJPPI telah menetapkan sasaran strategi yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategis BBSPJPPI. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka juga telah ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri
		2.Terwujudnya layanan jasa industri yang professional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)
			2. Nilai Net Promoter Score (NPS)
		3.Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan penerimaan negara bukan

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			pajak / PNB (Indeks)
			2. Jumlah hasil layanan jasa industri
			3. Nilai Revenue on Asset (RoA)
			4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen		
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	1. Terwujudnya SDM yang Profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
		2. Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
			2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
		3. Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien Profesional	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
			2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)
		4. Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker.

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA
			3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan
		5. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Selain itu terkait dengan pelaksanaan anggaran sesuai DIPA BBSPJPPI TA 2025, telah ditetapkan target keluaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Klasifikasi Rincian Output dan Target Tahun 2025

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	200 Orang
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	799 Industri
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	45 Unit
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
5	6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	91 Unit
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	162 orang
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 dokumen

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BBSPJPPI 2025-2029 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja utama pada Perkin ditetapkan berdasarkan indikator tujuan pada Peta Strategis BBSPJPPI.

Berdasarkan pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada satker di lingkungan BSKJI, ditetapkan indikator dan target kinerja Perkin tahun 2025 sebagaimana berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Perkin BBSPJPPI Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Ket
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	indeks	IKU
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	960	Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	IKU
2.	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88	Persen	Non IKU
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	40	Nilai	Non IKU
3.	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1.	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3	Persen	Non IKU
		2.	Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500	Hasil Layanan	Non IKU
		3.	Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50	Persen	Non IKU
		4.	Rasio Pendapatan Operasional terhadap	59	Persen	Non IKU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Ket
			Biaya Operasional (POBO)			
4.	Terwujudnya SDM yang profesional	1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30	Indeks	Non IKU
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	Persen	Non IKU
		2	Tingkat Penerapan (SPBE)	77	Persen	Non IKU
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62	Indeks	Non IKU
6.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	60	Persen	Non IKU
		2.	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	70.10	Nilai	Non IKU
7.	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1.	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45	Nilai	Non IKU
		2.	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93.40	Nilai	Non IKU
		3.	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75.00	Nilai	Non IKU
8	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	81	Persen	Non IKU

BAB. III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada awal tahun 2025 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJPPI kepada Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJPPI.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJPPI dapat dilihat pada lampiran.

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

A. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 8. Pengukuran Realisasi Tujuan Triwulan IV TA 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	3,70 indeks	100,54%	100%	100%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV 4] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan	B10-B12 : Penyebaran keusioner ke palanggan dengan jumlah kuesioner yang kembali TA 2025 sebanyak 308 buah dengan nilai 3,70.
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	1063 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	110,73 %	100%	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan	B10-B12 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi sampai TW IV sebanyak 976 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								kepada BBSPJPP 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW IV.	

Tujuan terdiri dari dua Indikator Kinerja, meliputi :

1) Indikator Kinerja Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator ini adalah 3,70 dari target 3,68 dengan capaian 100,54 %. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Jumlah pelanggan yang dilayani 976 pelanggan dengan jumlah kuesioner 308 buah.

Adapun rencana kegiatan triwulan IV adalah

- 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV
- 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV
- 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM TW IV
- 4] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

1. Bulan Oktober

- 1] Kuesioner yang kembali dari Bulan Januari – Oktober 2025 sebesar 224 kuesioner.
- 2] Hasil analisa IKM bulan Januari sampai dengan Oktober sebesar 3,76 berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017.

2. Bulan November

- 1] Kuesioner yang kembali dari Bulan Januari – November sebesar 248 kuesioner.
- 2] Hasil analisa IKM bulan Januari sampai dengan November sebesar 3,70 berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017.

3. Bulan Desember

- 1] Kuesioner yang kembali dari Bulan Januari – Desember sebesar 308 kuesioner.
- 2] Hasil analisa IKM bulan Januari sampai dengan Desember sebesar 3,70 berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017.

Tabel 9. Rekapitulasi Indeks IKM

Jumlah kuesioner	Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Indeks 4
308	0	1	193	114

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target fisik rencana kinerja sd Triwulan IV telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala

Tidak ada kendala. Tetapi ada hal yang jika diatasi bisa meningkatkan jumlah responden kuesioner seperti belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua pelanggan pada semua jasa layanan yang dapat diberikan kuesioner IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Selain itu, sistem SINDII belum mengakomodir keharusan untuk mengisi kuesioner pelanggan sebelum perusahaan mengunduh LHU mandiri.

c Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah melakukan strategi untuk menarik minat pelanggan untuk mengisi survey IKM di semua jasa layanan BBSPJPPI. Selain itu, memperbaiki platform SINDII agar bisa menjadi sarana pelanggan untuk mengisi survey sebelum mengunduh hasil layanan (laporan hasil uji. Sertifikat, dll)

Evaluasi dari kegiatan ini adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner yang diblasting melalui WA dan email, platform SINDII belum bisa digunakan sebagai sarana pengisian kuesioner, sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner IKM belum dilaksanakan di media sosial BBSPJPPI serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi dalam satu pintu.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

1. Membuat tampilan kuesioner yang lebih menarik, sehingga minat pelanggan untuk mengisi kuesioner semakin meningkat.
2. Optimalisasi platform SINDII sebagai sarana dan prasarana penyampaian dan pengisian kuesioner agar dapat terealisasi dimana pelanggan diharuskan mengisi kuesioner IKM sebelum mengunduh LHU.
3. Penjadwalan sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner terintegrasi BBSPJPPI dilakukan setiap awal bulan.
4. Membuat dokumen data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu (rekapitulasi lengkap, terutama narahubung). Selain itu, dapat pula membuat database melalui SINDII berdasarkan nomor order layanan yang digunakan (nomor order masih dalam tahap pengembangan).

2) Indikator Kinerja Tujuan 1.2 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Jumlah realisasi layanan dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Hal ini mengingat kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 1063 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi dari target 960 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi dengan capaian 110,73%.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024.

Adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI
- 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW IV

Realisasi fisik dari kegiatan sampai Desember 2025 adalah capaian realisasi layanan teknis berdasarkan jumlah transaksi/order dari periode bulan Januari sampai Desember berdasarkan data berikut :

Tabel 10. Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri

No	Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan		
			Januari- Oktober 2025	Januari-Nov 2025	Jan – Des 2025
1	Layanan Pengujian	Perusahaan/ pelaku industri/instansi	448	485	506
2	Layanan Kalibrasi		56	67	73
3	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis		14	14	23
4	Layanan Sertifikasi		207	243	261
5	Layanan Inspeksi Teknik		0	0	0

No	Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan		
			Januari- Oktober 2025	Januari-Nov 2025	Jan – Des 2025
6	Layanan Konsultasi (Penyusunan Pertek)		3	8	50
7	Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)		1	1	1
8	Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL)		1	1	1
9	Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)		37	37	37
10	Layanan Pemeriksaan Produk Halal		10	55	62
11	Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi		43	43	49
12	Layanan Produsen Bahan Acuan		0	0	0
13	Layanan lainnya		0	0	0
		Total	820	954	1063

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja telah berhasil dicapai. Tetapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan capaian belum optimal antara lain :

- Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik DLH maupun kompetitor yang lebih murah.
- Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan

halal, Verifikasi TKDN, audit CEMS, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan

c. Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah meningkatkan promosi baik secara *online* maupun *offline* (pameran-pameran) , memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPJPPI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperlukan pendekatan kembali kepada pelanggan yang beralih dari BBSPJPPI dengan tetap mendorong upaya peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan.

Rencana perbaikan di Tahun selanjutnya adalah:

- 1 *Follow up* secara berkala untuk calon pelanggan dari hasil kegiatan pameran salah satunya dengan blasting promosi jasa layanan BBSPJPPI.
- 2 Finalisasi draft revisi tariff agar tariff jasa layanan lebih kompetitif.

B. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional

Tabel 11.Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 1 Triwulan IV TA 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88 Persen	94,23 Persen	107,08 %	100%	100%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/	B10-B12 : 1.Melakukan penyelesaian semua jenis layanan sesuai SPM. 2.Pemeliharaan peralatan 3.Monitoring dan evaluasi SPM layanan secara berkala.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV.	
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	40 nilai	63 nilai	157,5 %	100%	100%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW IV	B10 – B12: jumlah responden sampai Desember 308 responden dengan promotor 204 responden, passives 94 pelanggan dan detractors 10 pelanggan

Sasaran Kegiatan 1, mempunyai dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA).

Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai Service Level Agreement (SLA) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan balai dalam memberikan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SLA atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator ini mencerminkan

efisiensi dan keandalan layanan yang diberikan kepada pengguna, di mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan terhadap standar waktu layanan yang dijanjikan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA =

$(\Sigma \text{ Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SPM} / \Sigma \text{ Pelayanan yang diberikan}) \times 100\%$

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 94,23 % dari target 88 persen dengan capaian 107,08 %.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Total order/SPK/transaksi TA 2025 sebesar 8.146 order/SPK/transaksi sedangkan jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah 7.676 order/SPK/transaksi.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan
2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi
3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV
5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan
6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan.

Realisasi Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan IV adalah

Tabel 12. Perhitungan SLA Januari – Desember 2025

Layanan	Januari - Desember	
	Jumlah sampel/ transaksi/Order	Sampel sesuai SPM
Layanan Pengujian	6.924	6.465
Layanan Kalibrasi	718	716
Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	23	23
Layanan Sertifikasi	281	272
Layanan Inspeksi Teknik	0	0

Layanan	Januari - Desember	
	Jumlah sampel/ transaksi/Order	Sampel sesuai SPM
Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek)	50	50
Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)	1	1
Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL)	1	1
Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)	37	37
Layanan Pemeriksaan Produk Halal	62	62
Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi	49	49
Layanan Produsen Bahan Acuan	0	0
Layanan lainnya	0	0
Total	8.146	7.676

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan

b. Kendala.

1. Permintaan dari pelanggan (PT KPI RU IV) untuk penerbitan LHU menunggu data rata-rata debit di awal bulan berikutnya. Dimana rata-rata tiap bulan ada 15 LHU.
2. Parameter uji yang disubkontrak ke laboratorium lain, dimana SPM laboratorium tersebut lebih dari 14 hari. Contohnya subkon di AAS, BATAN dan LabkesProv. Hal ini berpengaruh pada SPM ke pelanggan.
3. Kendala kerusakan peralatan dan keterlambatan bahan kimia. Kerusakan terjadi di alat AAS Flame dan Grafit Furnace dan berpengaruh pada proses pengujian pada parameter logam. Sedangkan untuk bahan kimia adalah reagen Spektro Gallery dimana bahan kimia memang khusus buatan Thermo sehingga tidak ada alternative lain.
4. Pelanggan mengajukan revisi alamat pada lembar sertifikat kalibrasi.
5. Adanya perubahan dokumen legalitas perusahaan yang harus di sesuaikan, sehingga butuh waktu lebih lama untuk penyelesaian pekerjaan

6. Untuk pekerjaan *one stop service* (audit SNI dan ISO yang dilakukan bersamaan) untuk SLAny tidak sama dan kadang untuk Pantek perusahaan minta dilakukan bersamaan karena untuk menyamakan siklus.

c. Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah :

- Untuk penyesuaian layanan karena permintaan pelanggan, maka di sistem SINDIi perlu diberikan kode khusus, sehingga untuk waktu penyelesaian layanan tidak dianggap melebihi SPM.
- Laboratorium BBSPJPPI mulai mempelajari parameter uji yang disubkontrak agar tidak perlu disubkontrakkan lagi.
- Melakukan mitigasi resiko dari peralatan-peralatan yang sudah lebih dari 10 tahun, dan pengadaan bahan kimia yang perlu indent lebih dari 30 hari.

Evaluasi dari pelaksanaan adalah

1. Koordinasi dengan Tim SINDIi untuk penambahan kode contoh dengan permintaan khusus pelanggan.
2. Laboratorium sudah melakukan pelatihan dan mulai menginventaris kebutuhan untuk perluasan ruang lingkup pengujian.
3. Membuat skala prioritas untuk peremajaan peralatan pengujian.
4. Memastikan dokumen permohonan sudah lengkap dan sesuai pada saat di proses
5. Untuk kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan bersamaan antara SNI dan ISO 9001:2015 akan dicoba untuk di lakukan evaluasi secara terpisah

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah Aplikasi SINDIi ditambah kode contoh "4" untuk pengujian dengan permintaan khusus dari pelanggan, melakukan pengadaan untuk bahan dan peralatan untuk memperluas parameter pengujian dan untuk Tahun 2026, skala prioritas pengadaan alat AAS Flame – GF, Permohonan sertifikasi melalui aplikasi SIINAS tim kerja Sertifikasi akan berkoordinasi dengan tim Kerja PJI untuk memastikan kelengkapan dokumen permohonan yang sesuai dan lengkap dan untuk kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan bersamaan antara SNI dan ISO 9001:2015 proses pelaksanaan rapat Pantek akan dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian SLA masing-masing kegiatan.

2) Indikator Kinerja Sasaran 1.2 : Nilai *Net Promoter Score* (NPS)

NPS adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS sering dianggap sebagai prediktor utama pertumbuhan perusahaan.

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

> **Promoters (9-10)**: Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

> **Passives (7-8)**: Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.

> **Detractors (0-6)**: Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*.

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*)

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 63 dari target 40 Nilai dengan capaian 157,5 %.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Tabel 13. Kategori pelanggan dalam NPS

Kategori	Jumlah
<i>Promoters</i>	204
<i>Passives</i>	94
<i>Detractors</i>	10
Total	308

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan
- 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian *Net Promoter Score* (NPS) TW IV.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan IV adalah

1. Bulan Oktober

- ✓ Penyebaran kuesioner sampai Bulan Oktober sebanyak 224 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 153 pelanggan, *passives* 63 pelanggan dan *detractors* 8 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Oktober 2025 adalah sebesar 64,73.

2. Bulan November

- ✓ Penyebaran kuesioner sampai Bulan November sebanyak 248 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 168 pelanggan, *passives* 72 pelanggan dan *detractors* 8 pelanggan
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan November 2025 adalah sebesar 64,52.

3. Bulan Desember

- ✓ Penyebaran kuesioner sampai Bulan Desember sebanyak 308 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 204 pelanggan, *passives* 94 pelanggan dan *detractors* 10 pelanggan
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar 63.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Jumlah responden pengisian NPS mengikuti jumlah responden pengisian IKM dimana tingkat pengembalian kuesioner masih rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDIi sebelum perusahaan mengunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan. Selain itu belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih

terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey NPS.

c. Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi survey NPS sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan *feedback* yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan blasting WA dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. Platform SINDIi bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana keharusan pelanggan untuk mengisi survey NPS sebelum mengunduh laporan hasil uji. Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, survey NPS diberikan setelah pelaksanaan audit, surveilen maupun verifikasi.

Evaluasi dari kegiatan ini adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner yang diblasting melalui WA dan email, platform SINDIi belum bisa digunakan sebagai sarana pengisian kuesioner, sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner NPS belum dilaksanakan di media sosial BBSPJPPI serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi dalam satu pintu.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah melakukan edukasi dan komunikasi secara intens ke pelanggan untuk pengisian kuesioner dan mengirimkannya kembali secara online ke BBSPJPPI, edukasi kepada pelanggan terkait upaya peningkatan layanan BBSPJPPI untuk memaksimalkan penilaian NPS dan memperbaiki sistem SINDIi sehingga pelanggan yang mengunduh LHU dapat langsung terkoneksi dengan kuesioner dan sebagai keharusan pengisian sebelum mengunduh LHU.

C. Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri

Tabel 14. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 2 Triwulan IV TA 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 indeks	3 indeks	100 %	100%	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa	B10: Penerimaan sampai Bulan Oktober 2025 sebesar Rp. 16.116.012.054 B11: Penerimaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.	sampai bulan November 2025 sebesar Rp. 17.534.755.520,- B12: Penerimaan PNBP BBSPJPPI sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar Rp. 20.483.355.953,-
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7500 hasil layanan	8574 hasil layanan	114,32 %	100%	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.	B10: Jumlah layanan jasa industri sampai Oktober 2025 sebesar 6679 hasil layanan. B11: Jumlah layanan jasa industri sampai November 2025 sebesar 7745 hasil layanan B12: Jumlah layanan jasa industri sampai Desember 2025 sebesar 8.574 hasil layanan
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50 %	15,90 %	109,66 %	100%	100%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan	B10-B12 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan IV			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	Oktober-Desember 2025 2. melakukan pengesahan penerimaan Oktober-Desember 2025. 3. Updating nilai buku asset satuan kerja. Dimana Penerimaan Rp 20.483.355.953,- sedangkan asset tetap Rp.128.805.844.474
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	59 Persen	61,46 Persen	104,17 %	100%	100%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	B10-B12 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan Oktober-Desember 2025. 2.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU Oktober-Desember 2025. Dimana pendapatan operasional Rp.19.478.685.554 sedangkan belanja operasional Rp.31.695.068.393

Sasaran Kegiatan 2, mempunyai empat Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 2.1 : Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Disamping itu, untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBP.

Cara menghitungnya sebagai berikut :

Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun **2024 sebagai baseline** (A) dibagi A dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = \frac{(B-A)}{A} \times 100\%$$

Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:

Indeks	Range Peningkatan PNBP
1	$\leq 5\%$
2	$5 < x \leq 20\%$
3	$20 < x \leq 50\%$
4	$50 < x \leq 100\%$
5	> 100

a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja adalah 3 indeks dari target 3 indeks dengan capaian 100% .Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI

- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan IV adalah

1. Melakukan promosi layanan jasa pelanggan.
2. Membuat kontrak penawaran
3. Monitoring dan evaluasi capaian penerimaan Triwulan IV
4. Penerimaan Januari – Desember 2025 sebesar Rp 20.483.355.953 dari target Rp. 18.686.000.000,- (109,62 % dari target)
5. Baseline penerimaan 2024 sebesar Rp.15.500.000.000

$$\text{Indeks peningkatan PNBP} = \frac{20.483.355.953 - 15.500.000.000}{15.500.000.000} = 32,15\% \text{ (masuk indeks 3)}$$

Tabel 15. Penerimaan 2025

No	Jasa Layanan	Jumlah (Rp)
1	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	13.763.069.673
2	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	1.254.866.852
3	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	2.506.060.000
4	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	184.587.100
5	Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	1.096.133.500
6	Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Teknis	1.237.909.000
7	Penyelenggara Uji Profisiensi	121.139.192
8	Jasa Sertifikasi Halal	76.548.000
9	Pendapatan sewa gedung	56.250.000
10	Penerimaan lain-lain/Titipan	96.594.622
11	Jasa Giro BLU	100.198.014
	JUMLAH	Rp. 20.483.355.953

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Ada beberapa kendala yg mengakibatkan penerimaan PNBP BBSPJPPI masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
3. Ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi masih terbatas.
4. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisisensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
5. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.
6. Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPJPPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPPI

c) Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah melakukan pemenuhan kesenjangan (*gap*) kompetensi yang ada dengan menyesuakannya terhadap kebutuhan pasar, serta memperkuat kegiatan promosi melalui media sosial. Selain itu, disediakan layanan konsultasi gratis melalui *zoom* dan pertemuan tatap muka (*offline*) untuk mendukung jasa layanan yang sudah ada maupun pengembangan layanan baru.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pelatihan dalam rangka pemenuhan *gap* kompetensi belum dapat dilakukan secara optimal karena harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia dan calon pelanggan masih memiliki keraguan terhadap kapabilitas BBSPJPPI, sehingga pencapaian perolehan pelanggan untuk layanan baru belum optimal. Selain itu, terdapat keterbatasan anggaran persediaan barang, khususnya untuk pengadaan sparepart AiMS yang diperlukan sebagai modal penjualan alat AiMS.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan promosi layanan baru BBSPJPPI yang meliputi uji RATA, CGA, CEMS, Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal, TKDN, dan LSP melalui penyusunan portofolio layanan yang komprehensif serta perluasan jejaring kerja (*networking*) dengan memanfaatkan media sosial resmi balai dan keikutsertaan dalam kegiatan pameran.
2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian dan kalibrasi yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
3. Mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerimaan PNBPN (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK).
4. Menerapkan skala prioritas penggunaan anggaran pelatihan.
5. Dilakukan koordinasi intensif berkala antara bagian keuangan dengan bagian teknis yang memudahkan penyampaian kelengkapan dokumen penagihan untuk pekerjaan kontrak kerjasama pemantauan lingkungan.

2) Indikator Kinerja Sasaran 2.2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasa di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Catatan:

1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan.
2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN berbayar.

Cara Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan). Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
3. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Sertifikat/ Laporan)
4. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance)
5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
6. Layanan Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi/ Kajian)
7. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)
8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekrayaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan)
11. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Hasil Uji)
12. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: sampel)
13. Layanan lainnya (satuan: Laporan/ order/ SPK/ rekomendasi)

a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 8.574 Hasil Layanan dari target 7.500 Hasil Layanan dengan capaian 114,32%. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan IV adalah

- 1] Melakukan promosi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Memberikan jasa layanan ke pelanggan sesuai kesepakatan.
- 3] Menjalin komunikasi yg efektif ke pelanggan
- 4] Monitoring dan evaluasi capaian jumlah hasil layanan jasa industri.

Tabel 16. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Jasa Layanan	Satuan	Januari-Desember
Layanan Pengujian	LHU	7078
Layanan Kalibrasi	LHU	723
Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	Sertifikat/Laporan	151
Layanan Sertifikasi	Sertifikat/Hasil surveilen	284
Layanan Inspeksi Teknik	Laporan Hasil Inspeksi	0
Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek)	Laporan Hasil Konsultansi/Kajian	50
Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)	Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin	1
Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL)	Laporan Hasil RBPI	1
Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)	Laporan Verifikasi	166
Layanan Pemeriksaan Produk Halal	Lapran Hasil Pemeriksaan	71
Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi	Laporan Hasil Uji	49
Layanan Produsen Bahan Acuan	Sampel	0
Layanan lainnya	Laporan/order/SPK	0
Total		8.574

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

b Kendala.

Ada beberapa kendala yg mengakibatkan indikator jumlah layanan jasa industri masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian
3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, penjualan produk AiMS dan layanan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

c Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah meningkatkan promosi baik secara *online* maupun *offline* (pameran-pameran) , memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPJPPI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan.

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah selama tahun 2025, BBSPJPPI telah mengikuti berbagai kegiatan pameran dengan tema yang selaras dengan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pameran melalui kegiatan *follow up* kepada pengunjung *booth* pameran. Namun demikian, umpan balik (*feedback*) yang diharapkan dari kegiatan tersebut belum optimal. Di sisi lain, kegiatan promosi melalui kanal resmi BBSPJPPI tetap dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jadwal konten mingguan yang telah ditetapkan.

Rencana perbaikan di Tahun selanjutnya adalah

1. *Follow up* secara berkala untuk calon pelanggan dari hasil kegiatan pameran salah satunya dengan blasting promosi jasa layanan BBSPJPPI.
2. Finalisasi draft revisi tarif agar tarif jasa layanan lebih kompetitif.

3) Indikator Kinerja Sasaran 2.3 : Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

Nilai *Revenue on Asset* (RoA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas di balai dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.

Cara menghitungnya yaitu Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun ke-n dibagi dengan total nilai aset pada tahun ke- n (tahun berjalan) dikalikan 100%.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 15,90 persen dari target 14,50 persen dengan capaian 109,66% . Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
2. Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU
3. Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan IV adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Oktober-Desember 2025
2. Melakukan monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan
3. Melakukan perhitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku.

Perhitungan ROA : $\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset tetap}} \times 100 \%$

$$: \frac{\text{Rp } 20.483.355.953}{\text{Rp } 128.805.844.474} \times 100\% = 15,90 \%$$

b. Kendala.

Penerimaan BLU sampai dengan Triwulan III masih dibawah target rata-rata bulanan.

c. Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah melakukan penagihan piutang, melakukan penagihan terhadap pekerjaan yang sudah selesai dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dan piutang serta melakukan update atas aset tetap.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah untuk kedepannya akan dilakukan penagihan terhadap pekerjaan yang telah selesai, piutang , dan segera menyelesaikan pekerjaan atas pendapatan yang diterima di muka.

4) Indikator Kinerja Sasaran 2.4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

$$\text{POBO} = (\text{Pendapatan Operasional} / \text{Biaya Operasional}) \times 100\%$$

Catatan:

1. Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)".
2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan PNBP, **tidak termasuk** penyusutan, dan amortisasi.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 61,46% dari target 59% dengan capaian 104,17. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU
- 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan IV adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Oktober-Desember 2025.
2. Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU periode Oktober-Desember 2025

Pendapatan Operasional : Rp. 19.478.685.554,-

Belanja Operasional (tidak termasuk penyusutan, dan amortisasi) : Rp. 31.695.068.393,-

$$POBO = \frac{19.478.685.554}{31.695.068.393} = 61,46 \%$$

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi Pendapatan Diterima di Muka (PDDM).

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memonitoring capaian nilai Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) setiap bulan.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM.

D. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya SDM yang professional

Tabel 17. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Triwulan IV TA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan IV	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.30 Indeks	82,10 Indeks	100,98 %	100	100	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW IV.	B10-12 : 1.Evaluasi rencana dan realisasi kompetensi SDM sesuai ketersediaan anggaran. 2.Fasilitasi diklat 3.Pembaharuan informasi pendidikan dan pelatihan pegawai.

Sasaran Kegiatan 3 mempunyai satu Indikator Kinerja yaitu **Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)**

1) Indikator Kinerja Sasaran 3.1 : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimana pelatihan tidak dibatasi jam pelajaran, dan sifat pelatihan tidak terbatas pada pelatihan yang terkait layanan jasa. Selain pelatihan yang bersifat baku, kegiatan peningkatan kompetensi lainnya seperti Bimtek, *Workshop*, Seminar dan sebagainya dapat diakui.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 82,10 indeks dari target 81,30 indeks dengan capaian 100,98%. Nilai ini berdasarkan perhitungan mandiri tim Pokja OSDM BBSPJPPI. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural.
- 2) Pelaksanaan workshop/Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai.
- 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala.
- 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW IV.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

1. Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.
2. Pembaruan Informasi Pendidikan & Pelatihan Pegawai.
3. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional.
4. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi di Bulan Oktober (1. Sosialisasi Aspek Riset dan Inovasi Pada Perhitungan TKDN dan BMP 2025; 2. Training on GHG Emissions and Removal Calculation for Industrial Sector; 3. Pelatihan IDEXX Coli-18; 4. Metode Pengujian Mikrobiologi Air Parameter E-Coli dan Coliform sesuai ISO 9308-2 dan Standard Method APHA 9223B; 5. Bimbingan Teknis Audit Teknologi Industri; 6. Pelatihan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi Pada Sampel Pangan dan Air).
5. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (1. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 1; 2. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 5).
6. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi di Bulan November (1. Bimbingan Teknis Audit Teknologi Industri; 2. Bimbingan Teknis SDM Kehumasan BSKJI Penguatan Kompetensi Kehumasan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; 3. Bimbingan Teknis Pemahaman Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015; 4. Pelatihan Internal Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017; 5. Webinar Manajemen Kalibrasi).

7. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi Bulan Desember (1. Diklat & Sertifikasi Audit Internal Keuangan; 2. Internalisasi Asesmen Kompetensi CLSP; 3. Pelatihan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 4. Pelatihan Asesor Kompetensi CLSP)

Dari data di atas, maka indikator ini berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Tidak ada kendala tetapi ada beberapa hal yang jika diatasi bisa meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN seperti :

1. Jenis tingkat pendidikan SDM yang diperlukan organisasi tidak pada tingkatan dengan bobot maksimal.
2. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) & Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) belum memperoleh kuota dari Penyelenggara sesuai jadwal kebutuhan.
3. Perubahan kebijakan penerapan Diklat Fungsional di masing-masing unit pembina termasuk penjadwalan yang tidak pasti.

c. Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025, monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar, koordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara PKN & PKA, mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi, mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat dan mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah

- 1] Perubahan regulasi terkait perhitungan IPASN & perpindahan Jabatan dari Pelaksana ke JFT mengakibatkan nilai beberapa personil menurun akibat belum mengikuti Pelatihan Fungsional JFT
- 2] Beberapa personil dengan tingkat pendidikan D3 yang mengajukan Tugas Belajar Mandiri dan tidak mengajukan penyesuaian Jabatan berpotensi meningkatkan Nilai IPASN
- 3] Realisasi fasilitasi pelatihan masih belum sesuai dengan rencana usulan karena batasan ketersediaan kuota & anggaran untuk PKN, PKA & Diklat Fungsional
- 4] Terdapat beberapa realisasi pelatihan teknis diluar rencana, akibat perubahan regulasi, hasil audit & kebutuhan jasa layanan baru

5] Persetujuan anggaran pelatihan melalui mekanisme realokasi anggaran baru diperoleh pada Triwulan IV, sehingga pelatihan berbayar yang sebelumnya tidak terrealisasi di TW I-III baru dapat diakomodir pada periode tersebut.

6] Terdapat beberapa personil yang tidak memperoleh layanan pelatihan

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- Melanjutkan proses pemberian izin Tugas belajar tanpa melakukan penyesuaian jabatan eksisting
- Koordinasi dengan Unit Pembina Pelatihan Jabatan untuk pelaksanaan Diklat Fungsional
- Penyesuaian jadwal rencana pelatihan mengacu postur anggaran yang tersedia
- Koordinasi dengan Manajemen & Tim Kerja terkait penugasan Pelatihan Teknis sesuai jabatan seluruh anggota minimal 1 pelatihan per tahun.

E. Sasaran Kegiatan 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 18. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 4 Triwulan IV TA 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan IV	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	20 Persen	100 %	100	100	1] Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem. 2] Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi 3] Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem 4] Monitoring dan evaluasi	B10: Perbaikan system integrase internal B11: Verifikasi data yang terintegrasi dengan SIPPT B12: Evaluasi hasil rekonsiliasi
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77 Persen	88,81 Persen	115,34 %	100	100	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang. 2] Melakukan ujicoba implementasi sistem SPBE secara terbatas.	B10-B12 : 1.Penyusunan bukti dukung SPBE. 2. Konsultasi dengan pusdatin terkait LKE 3.Mengunggah bukti dukung SPBE ke akun lemon

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan IV	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4..62 indeks	4,95 indeks	107,14%	100	100	1] Update website secara berkala 2] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5] Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan	B10-B12 : 1.Update medsos dan website 2.update SINDII 3 Mengirim bukti dukung IPP ke Biro Humas .

Sasaran Kegiatan 4 mempunyai tiga Indikator Kinerja Sasaran yaitu

1) Indikator Kinerja Sasaran 4.1 : Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI.

Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan *platform* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker.

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI.

Catatan:

Secara akumulatif, pada tahun 2025 target integrasi layanan pengujian, bertambah di tahun 2026 layanan sertifikasi, 2027 layanan kalibrasi, 2028 layanan bimbingan dan pendampingan teknis, 2029 layanan konsultasi.

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

%Jenis layanan yang terintegrasi = Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n (Z) \times 100%

Contoh 1:

Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = 1/5 \times 100\% = 20\%$$

Contoh 2:

Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = 2/5 \times 100\% = 40\%$$

Contoh 3:

Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = 2/5 \times 100\% = 40\%$$

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 20% dari target 20% dengan capaian 100% . Realisasi indikator ini sesuai Nota Dinas 5684/BSKJI.1/LP/XII/2025 tanggal 18

Desember 2025 terkait Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Layanan Publik Satker UPT BSKJI Triwulan 3. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

Adapun rencana kegiatan triwulan IV adalah

1. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem
2. Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi
3. Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem
4. Monitoring dan evaluasi

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1. Bulan Oktober

- 1) Melakukan perbaikan dalam sistem integrasi internal menyesuaikan dengan manual API SIPPT 5.0.
- 2) Melakukan evaluasi sistem informasi terintegrasi dengan memverifikasi data yang terkirim ke SIPPT dengan data internal sesuai dengan petunjuk manual API SIPPT versi 5.0.

2. Bulan November

- 1] Melakukan rekonsiliasi dengan pihak BSKJI terkait hasil integrasi data layanan ke SIPPT untuk data terkirim per Triwulan III dengan hasil akurasi keseluruhan data terkirim dengan data transaksi penerimaan BLU OM-SPAN sebesar 71,36%.
- 2] Melakukan verifikasi serta *crosscheck* data yang terintegrasi SIPPT dengan data penerimaan BLU.

3. Bulan Desember

- 1] mengevaluasi Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Layanan Publik Satker UPT BSKJI Triwulan 3 Tahun 2025.
- 2] Melakukan verifikasi serta *crosscheck* data yang terintegrasi SIPPT dengan data penerimaan BLU.

b. Kendala

✓ Tidak ada kendala.

c. Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah

1] Melakukan optimalisasi arsitektur integrasi data layanan sebagai tindak lanjut hasil rekonsiliasi integrasi SIPPT Triwulan III bersama BSKJI, guna meningkatkan persentase keterpaduan jenis layanan yang terintegrasi.

2] Menyesuaikan proses integrasi dengan dokumentasi teknis integrasi terbaru yang sudah memuat tanggal pengesahan sebagai standar pengiriman data layanan.

3] Memastikan seluruh jenis layanan utama terakomodasi dalam skema SIPPT secara menyeluruh dan sudah menyesuaikan nilainya dengan OM-SPAN.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

1] Pelaksanaan integrasi data layanan pada Triwulan IV menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Triwulan III, ditandai dengan semua data layanan yang berhasil terkirim dengan hasil PNBP per layanan yang mirip / setara dengan data OM-SPAN Keuangan

2] Ditemukan ketergantungan terhadap konsistensi format spreadsheet keuangan, yang berpotensi memengaruhi stabilitas proses ekstraksi data apabila terjadi perubahan format atau keterlambatan pembaruan data.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- Integrasi keseluruhan data internal (Pokja, Tim, Layanan) ke dalam bentuk satu data yang sudah tervalidasi dan bisa digunakan untuk integrasi data SIPPT.
- Menata ulang aplikasi SPBE internal agar mendukung proses integrasi sistem informasi BSKJI (SIPPT).

2) Indikator Kinerja Sasaran 4.2. : Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, serta infrastruktur pendukung SPBE di suatu instansi.

Cara menghitungnya adalah memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (11 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (4 sub indikator).

Dari setiap sub indikator yang berjumlah total 23 tersebut, perlu dibuktikan dengan data dukung

sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lemon Kemenperin yang disediakan oleh Pusdatin.

a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 88,81% dari target 77% dengan capaian 115,34%. Hasil nilai sesuai Nota Dinas Nomor 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal Hasil Akhir Penilaian SPBE Tahun 2025. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%.

Adapun rencana kegiatan triwulan IV adalah

1. Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang
2. Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1. Bulan Oktober

- 1) Melakukan pengumpulan bukti dukung penilaian LKE SPBE dari 3 aspek (tata kelola, manajemen dan layanan).
- 2) Melakukan penyusunan bukti dukung penilaian LKE SPBE.

2. Bulan November

- 1) Melakukan pembahasan internal bukti dukung penilaian LKE SPBE.
- 2) Melakukan pengisian LKE SPBE.
- 3) Konsultasi dengan Pusdatin terkait bukti dukung LKE SPBE.
- 4) Melakukan perbaikan dan melengkapi bukti dukung hasil konsultasi dengan pusdatin.
- 5) Mengunggah bukti dukung dan LKE SPBE ke akun lemon.

3. Bulan Desember

- 1) Mengikuti pembahasan penilaian sementara perjakan SPBE dengan Pusdatin
- 2) Melakukan klarifikasi hasil penilaian sementara dan konsultasi perbaikan bukti dukung LKE SPBE dengan Pusdatin
- 3) Memperbaiki dokumen bukti dukung LKE SPBE
- 4) Mengunggah revisi bukti dukung dan LKE SPBE ke akun lemon

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b) Kendala

Belum adanya petunjuk teknis terkait dengan penjelasan butir revidi LKE penerapan SPBE.

c) Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah

- Evaluasi teknis terkait penerapan SPBE di lingkungan BBSPJPP
- Koordinasi lebih lanjut dengan Pusdatin terkait pedoman teknis penerapan SPBE
- Perbaikan terkait revidi LKE SPBE

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- 1] Ketidadaannya standar acuan yang rinci terkait penilaian revidi SPBE baik dari sisi penerapan dan kebijakan menyebabkan beberapa hasil akhir revidi menjadi kosong karena ketidaksesuaian konsep dengan LKE yang di-revidi
- 2] Efisiensi Anggaran menyebabkan pengembangan beberapa modul SINDI tidak bisa dilaksanakan sehingga pemenuhan dari penilaian penerapan SPBE di aspek tata kelola tidak bisa maksimal.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- Merencanakan teknis maupun administrative terkait pengembangan aplikasi SPBE.
- Penguatan koordinasi internal terkait pembagian tanggungjawab penerapan teknis SPBE
- Konsultasi dan koordinasi ke Pusdatin terkait penerapan SPBE.
- Sosialisasi internal terkait penggunaan aplikasi SPBE.

3) Indikator Kinerja Sasaran 4.3. : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 4,95 dari target 4,62 dengan

capaian 107,14% . Hasil nilai sesuai Nota Dinas 5685/BSKJI.1/LP/XI/2025 tanggal 18 Desember 2025 terkait Penyampaian Nilai Akhir Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahun 2025 di Lingkungan BSKJI. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi 100 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan IV adalah

- 1] Update website secara berkala
- 2] Update Medsos secara berkala dan setiap saat
- 3] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat
- 4] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik
- 5] Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

- 1) Meninjau dan memperbaiki bukti dukung IPP dari saran perbaikan dari pihak BSKJI
- 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar
- 3) Memutakhirkan konten SIPPN dan website
- 4] Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik)
- 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan
- 6) Menindaklanjuti keluhan pelanggan/ pengaduan/ saran dan masukan yang muncul dari pelayanan
- 7) memutakhirkan bahan tayang elektronik dan non elektronik
- 8] Memperoleh nota dinas dari BSKJ terkait hasil penilaian IPP sebesar 4,95 (Nota Dinas 5685/BSKJI.1/LP/XI/2025 tentang Penyampaian Nilai Akhir Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Tahun 2025 di Lingkungan BSKJI).

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Kesulitan memutakhirkan data SP4N Lapor dan SIPPN karena adanya kendala akses ke akun yang disediakan.

c. Rekomendasi

Tindak lanjutnya adalah menyampaikan kembali kendala akses ke BSKJI untuk akun SP4N Lapor dan SIPPN.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum ada solusi untuk mengatasi aplikasi akun SP4NLapor dan SIPPN yang sering *error*.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah mengecek berkala terhadap akun SP4NLapor dan SIPPN supaya bisa memutakhirkan data ketika aplikasi sedang tidak *error*.

F. Sasaran Kegiatan 5 : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

Tabel 19. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 5 Triwulan IV TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan IV	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	60 Persen	100 Persen	166,67 %	100	100	1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan.	B10-12 : Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal BBSPJPPI dengan setitjen.
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	70,10 nilai	86,47 nilai	123,35 %	100	100	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. 3] Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian pengawasan Kearsipan TA 2024 4) Peningkatan kompetensi Arsiparis (Diklat/Bimteks/Workshop/Se mnas,)	B10-12 : -penyelenggaraan tata Kelola arsip secara fisik dan digital pada aplikasi Srikandi. -verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. - tindak lanjut hasil evaluasi penilaian pengawasan kearsipan TA 2024. - peningkatan kompetensi SDM arsiparis.

Pada Sasaran Kegiatan 5 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 5.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus :

$$A = \frac{(B+C)}{2}$$

A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)

B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)

C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 100% dari target 60% dengan capaian 166,67% . Berdasarkan Nota dinas Nomor R/180/IJ-IND/PW/X/2025 tanggal 31 Oktober terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal pada satker BBSPJPPI Tahun anggaran 2024 dapat dinyatakan selesai sesuai dengan saran yang telah ditindaklanjuti. Sedangkan Pada target fisik dari indikator ini 100 % dengan realisasi 100 %. Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan IV adalah:

1] Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan. Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

Bulan Oktober

1] Monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan penyampaian bukti dukung tindak lanjut oleh masing-masing Penanggung Jawab tindak lanjut

2] Penyampaian kelengkapan bukti tindak lanjut hasil pengawasan TA 2024 pada satker BBSPJPPI kepada Inspektorat Jenderal sesuai surat Kepala BBSPJPPI Nomor R/ 165 /BBSPJPPI/PR/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025

3] Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja dengan Tim auditor Inspektorat III pada 21 Oktober 2025

4] Perbaikan dokumen tindak lanjut sesuai hasil koordinasi dengan Tim Inspektorat III (perbaikan dok SOP Pemeliharaan Gedung)

Bulan November

1. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada satker BBSPJPPI TA 2024 sesuai surat Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor R/180/IJ-IND/PW/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Tidak ada kendala

c. Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah rekomendasi hasil pengawasan pada satker BBSPJPPI telah ditindaklanjuti dan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa bukti dukung yang disampaikan mendekati batas waktu tindak lanjut serta masih terdapat bukti dukung yang belum sesuai rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

1] Pengoptimalan waktu klarifikasi draft hasil pengawasan dengan Tim Auditor Itjen untuk memastikan point terkait temuan dan tindak lanjut yang direkomendasikan

2] Rapat berkala dengan Pj. Kegiatan/ Ka.Tim Kerja/ Pengelola Keuangan dan BMN untuk memonitoring penyelesaian tindak lanjut sesuai timeline rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan yang disepakati.

2) Indikator Kinerja Sasaran 5.2 : Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).

Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6

tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Tiap unit kerja dilakukan penilaian sesuai dengan kategori unitnya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.

Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 86,47 dari target 70,10 dengan capaian 123,35%. Hasil nilai sesuai Nota Dinas Kepala Biro Umum No. 855 /SJ-IND.6/KR/ XII/2025. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi capaian sebesar 100 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan IV meliputi:

- 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV.
- 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.
- 3] Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian pengawasan Kearsipan TA 2024
- 4] Peningkatan kompetensi Arsiparis (Diklat/Bimteks/Workshop/Semnas, dll)

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan sampai triwulan IV yaitu:

1. Bulan Oktober

- 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV.
- 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.
- 3] Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian pengawasan Kearsipan TA 2024, koordinasi dg Tim Pengawas Biro Umum, Sekjen pd tgl 15 - 16 Oktober 2025 di Jakarta.
- 4] Peningkatan kompetensi Arsiparis (Diklat/Bimteks/Workshop/Semnas, dll).

2. Bulan November

- 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV.
- 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.
- 3] Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian pengawasan Kearsipan TA 2024
- 4] Koordinasi hasil pengawasan kearsipan internal Kemenperin, dengan menerima kunjungan kegiatan kearsipan dari Biro Umum, Sekjen terkait tindak lanjut pengawasan kearsipan pada tanggal 26 November 2025.

3. Bulan Desember

- 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi TW IV.
- 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.
- 3] Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian pengawasan Kearsipan TA 2024
- 4] Hasil pengawasan kearsipan internal sesuai Nota Dinas Kepala Biro Umum No. 855 /SJ-IND.6/KR/ XII/2025 dengan nilai pengawasan kearsipan internal (unit kearsipan) sebesar 86,47.

Perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Nilai hasil pengawasan kearsipan mengalami penurunan dibanding tahun lalu, dikarenakan :

- 1). Ada penambahan indikator penilaian seperti tingkat digitalisasi.
- 2). Perbedaan pada indikator cara penilaian kearsipan.
- 3). TTE yang diakui hanya yang melalui aplikasi SRIKANDI.
- 4). Selama ini surat keluar dikelola oleh bagian masing-masing dan tidak disampaikan ke arsiparis sehingga sangat terbatas surat keluar yang diupload & dikirim melalui SRIKANDI

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjutnya adalah peningkatan SDM Pengelola Kearsipan khususnya pengelola SRIKANDI terkait Diklat Fungsional Kearsipan & Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik, menempatkan 1 orang arsiparis/ pengelola kearsipan yang fokus mengoperasikan SRIKANDI dan perlunya perhatian dari top management agar seluruh draft surat keluar harus diverifikasi arsiparis & yang sudah

ditandatangani agar (baik tanda tangan basah maupun TTE) disampaikan ke arsiparis untuk diupload di SRIKANDI.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada unit kearsipan BBSPJPPI telah dijalankan diantaranya dengan telah dilakukannya upaya pengendalian naskah dinamis, pengelolaan terkait penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kompetensi SDM khususnya menyangkut pengoperasian aplikasi persuratan Srikandi dalam mendukung pencapaian target pengawasan kearsipan internal

Rencana perbaikan untuk tahun selanjutnya adalah koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI.

G. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Tabel 20. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 6 triwulan IV TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan IV	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45 nilai	83,60	105,22	100 %	100%	1] Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	B10-B12 : melaksanakan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan secara tepat waktu.
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,40 nilai	90,92	97,34%	100 %	100%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4] Memastikan agar	B10-12: -Telah dibuat rencana penarikan dana bulanan. -monitoring realisasi belanja. Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan tiap triwulan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan IV	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
								pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.	
		3.Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75 nilai	94,75 nilai	126,33 %	100	100	1) Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September, Oktober, dan November tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan 6) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan	B10-B12 : 1) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni. 2) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU. 3) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN tahun berjalan. 4) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan tahun berjalan.

Pada Sasaran Kegiatan 6 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 6.1 : Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capainya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 83,60 dari target 79,45 nilai dengan capaian 105,22%. Hasil nilai berdasarkan LHE SAKIP BBSPJPPI Nomor 09/IJ-IND.4/LHE/IV/2025 tanggal 9 April 2025. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi capaian sebesar 100 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan IV meliputi:

- 1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu :

Bulan Oktober

- 1] Penyusunan dan penyampaian dokumen Laporan PP 39 Triwulan III 2025 sesuai Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 151/BBSPJPPI/PR/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025
- 2] Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sd Oktober 2025
- 3] Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan Oktober 2025
- 4] Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan Oktober 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas.

Bulan November

- 1] Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sd November 2025
- 2] Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan November 2025
- 3] Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan November 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas
- 4] Penyusunan matriks tindak lanjut LHE SAKIP pada satker BBSPJPPI

Bulan Desember

- 1] Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sd Desember 2025
- 2] Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan Desember 2025

3] Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan Desember 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas

4] Penyusunan draft Laporan PP 39 Tw IV 2025

5] Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP dengan Tim Inspektorat III pada 8 Desember 2025

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Terdapat perbedaan pelaporan capaian data kinerja layanan pada masing-masing Tim Kerja.

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjutnya adalah

1] Review dan penyesuaian SOP Pengumpulan Data (SOP Matriks Data Kinerja Layanan)

2] Pelaporan data capaian kinerja aspek layanan secara terpusat/satu pintu melalui Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

3] Koordinasi dengan Pokja Informasi dan Digitalisasi untuk pengembangan dashboard kinerja

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah secara umum implementasi SAKIP pada BBSPJPPI sudah berjalan diantaranya melalui penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja secara berkala yang disampaikan secara tepat waktu. Namun dalam proses pengukuran kinerja untuk pengumpulan data kinerja belum secara optimal memanfaatkan teknologi informasi yang secara otomatisasi mampu memantau capaian seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

1] Pemantauan rencana aksi secara periodik setiap bulannya dengan didukung dokumentasi yang memadai.

2] Koordinasi lebih lanjut dengan Pokja Informasi dan Digitalisasi untuk pengembangan dashboard kinerja dan otomatisasi pengukuran kinerja untuk seluruh indikator kinerja.

2) Indikator Kinerja Sasaran 6.2 : Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Satker.

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.

Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 90,92 nilai dari target 93,40 nilai dengan capaian 97,34% (tidak mencapai target). Data diambil dari OMSPAN. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi capaian sebesar 100 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan IV meliputi:

- 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA
- 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja
- 3] Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan
- 4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

1. Bulan Oktober

- 1] Penyampaian usulan Rencana Penarikan Dana Periode Tw IV 2025 oleh Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI
- 2] Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw IV 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sesuai surat KPA BBSPJPPI Nomor S-147/BBSPJPPI/PR/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 3 Oktober 2025.

2. Bulan November

1] Pengajuan usulan revisi kewenangan Kanwil dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran sesuai surat KPA BBSPJPPI Nomor S-216/BBSPJPPI/PR/XI/2025 tanggal 14 November 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 17 November 2025

3. Bulan Desember

1] Pengajuan usulan revisi kewenangan KPA dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran sesuai surat KPA BBSPJPPI Nomor B-230/BBSPJPPI/PR/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 12 Desember 2025.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

- 1] Penambahan volume output RO saat revisi pergeseran anggaran dikarenakan penerapan kebijakan SBKK yang menyebabkan terdapat potensi capaian output yang tidak tercapai
- 2] Penolakan usulan revisi dikarenakan pada usulan revisi terdapat penambahan pagu perjalanan dinas untuk operasional layanan yang tidak sesuai dengan kebijakan pembatasan perjalanan dinas dalam masa efisiensi
- 3] Penyusunan rencana penarikan dana Tw IV yang kurang optimal dikarenakan terdapat revisi relaksasi dan revisi optimalisasi setelah proses pengajuan revisi pemutakhiran hal III DIPA Tw IV 2025 sehingga berpotensi masih terdapat penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan.
- 4] Nilai Belanja Kontraktual, di indikator IKPA hanya 50 dari 100 .Hal ini dikarenakan BBSPJPPI mendaftarkan kontrak RM non *inaproc* mendekati akhir tahun sehingga nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak jelek/rendah.

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjutnya adalah Koordinasi dengan BSKJI, Birocana dan DJA terkait kebijakan penetapan RO SBKK dan penetapan blokir anggaran khususnya untuk RO yang bersifat/ untuk kegiatan layanan jasa teknis.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Untuk mendukung capaian kualitas pelaksanaan anggaran telah dilakukan revisi anggaran secara berkala sesuai batas waktu penyampaian revisi

dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran. Namun demikian, perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana belum disusun secara akurat, dan belum konsisten direalisasikan.

Mendaftarkan kontrak RM sebagai nilai belanja kontraktual di awal tahun berjalan.

Rencana perbaikan untuk tahun selanjutnya diantaranya:

- ✓ Melakukan reviu pelaksanaan kegiatan serta prognosis penyerapan anggaran secara periodik, setidaknya 1 kali dalam 1 triwulan.
- ✓ Melakukan koordinasi dan komunikasi yang optimal dengan BSKJI untuk pelaksanaan revisi terpusat yang bersamaan dengan jadwal revisi pemutakhiran hal III DIPA.
- ✓ Batas terakhir mendaftar kontrak RM sebelum triwulan II tahun berjalan.

3) Indikator Kinerja Sasaran 6.3 : Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.

Tingkat Satuan Kerja	
Komponen Penilaian	Bobot (%)
1. Kesesuaian dengan SAP	24%
2. Kecukupan Informasi	53,5%
3. Efektivitas Pengendalian Internal	9%
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	13,5%
Jumlah	100%

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah hasil penilaian dan analisis laporan keuangan tercapai dengan nilai 94,75 dari target nilai sebesar 75 dengan capaian 126,33. Hal ini sesuai ND Berdasarkan ND 3970/BSKJI.1/KU/IX/2025 tanggal 18 september 2025 perihal penyampaian hasil penilaian laporan keuangan tingkat satker Tahun Anggaran 2024. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 100 % dengan realisasi capaian sebesar 100 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan IV meliputi:

- Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited)
- Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni
- Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU
- Melakukan penyelesaian TDK dan *to do list*, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September, Oktober, dan November tahun berjalan
- Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan
- Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- 1) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni
- 2) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU
- 3) Melakukan penyelesaian TDK dan *to do list*, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN tahun berjalan.
- 4) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan tahun berjalan.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

Ketidaksiapan dokumen arsip dan data keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan audit PIPK maupun BPK tahun berjalan.

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjutnya adalah menyiapkan arsip keuangan untuk mendukung audit BPK dan penyusunan LK.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen arsip dan data keuangan harus sudah lengkap dikarenakan pemeriksaan terkadang waktu pemberitahuannya singkat.

Rencana perbaikan untuk tahun selanjutnya diantaranya:

1. Menempatkan salah satu atau beberapa pegawai untuk merapikan, melengkapi dan melakukan scan dokumen arsip keuangan dengan rutin dengan mempertimbangan jumlah berkas keuangan yang dihasilkan dalam setahun.

2. Menyiapkan data keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit dengan mempertimbangkan data keuangan yang dibutuhkan pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya.

H. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

Tabel 21. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 7 triwulan IV TA 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan IV	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	81 %	97,51 %	120,38%	100	100	<p>1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.</p> <p>2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan</p> <p>3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN</p> <p>4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging</p>	<p>B10-12 :</p> <p>1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.</p> <p>2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI.</p> <p>3TKDN sampai TW IV dr perhitungan akun terpilih sebesar 97,51%</p>

Pada Sasaran Kegiatan 7 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

1) Indikator Kinerja Sasaran 7.1 : Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama ada 14 akun meliputi akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 5251112, 5251113, dan 5251153.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (R_{P3DN}) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$$

Ket:

RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin

RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN

TotRA: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun terpilih.

a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan IV TA 2025 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 97,51% dari target 81 persen dengan capaian 120,38%. Sedangkan target fisik sebesar 100% dengan realisasi 100%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan IV adalah sebagai berikut:

- 1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- 2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan
- 3] Melakukan *tagging* realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi SAKTI

4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan *tagging*.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sd Triwulan IV yaitu:

- Melakukan pengadaan yang merupakan PDN, seperti : belanja barang, konsumsi rapat, pembayaran listrik, pengujian ke pihak lain, kalibrasi, dan perjalanan dinas
- Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN.
- Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri.
- Pembayaran kontrak tahun 2025 tenaga outsourcing: Petugas Kebersihan, Tenaga Keamanan, dan Pengemudi.

Berdasarkan monitoring capaian realisasi TKDN BBSPJPPI 2025 berdasarkan data *tagging* realisasi TKDN pada akun terpilih diperoleh data capaian sebesar 97,51 %.

Tabel 22. Perhitungan TKDN

Jenis Belanja	Pagu efektif	Realisasi	PDN	TKDN	Import	% Realisasi PDN+TKDN
521111	9.000.000	8.985.700	8.985.700	0	0	99,84
525112	269.994.000	269.602.596	269.602.596	0	0	99,86
525113	1.127.701.000	1.111.318.440	1.093.553.370	0	12.618.670	96,97
525115	5.253.889.000	5.152.989.270	5.152.989.270	0	0	98,08
522111	3.217.309.000	3.106.703.281	3.106.703.281	0	0	96,56
Total	9.877.893.000	9.649.599.287	9.631.834.217	0	12.618.670	97,51

Dari data di atas, perbandingan realisasi dan target maka berhasil dilaksanakan.

b. Kendala

1. Keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri.
2. Kebutuhan langganan aplikasi berbayar dari luar negeri (zoom).
3. Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjutnya adalah mencari referensi aplikasi berbayar yang dibutuhkan dan berasal dari dalam negeri dan mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal

yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah saat ini masih terkendala dengan adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan efisiensi anggaran TA 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah

- Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN.
- Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.

3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA BBSPJPI TA 2025 sampai dengan Triwulan IV 2025, capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan pada Triwulan IV TA. 2025 dengan mengacu pada aplikasi SMART Kemenkeu. Capaian realisasi keuangan berdasar pagu efektif sebesar 99,03 % sedangkan target capaian realisasi keuangan satker sesuai dengan prognosa realisasi yang diusulkan pada 22 Desember 2025 sebesar 99,81 % dan target BSKJI 99,01%. Untuk capaian fisik yang ditetapkan BSKJI sebesar 100 % dengan capaian realisasi fisik TW IV sebesar 100%. Secara lebih jelas capaian realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana berikut:

a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

a) Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 23.Kegiatan I realisasi fisik dan keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan 2025	TVR O	RVR O	Progres	Oktober		November		Desember	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	013 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri)	434.910.000	413.063.328 (94,98 %)	200 orang	286 orang	100 %	0	5	0	5	286	40

KRO	RO	Pagu Efektif	% Realisasi Keuangan 2025	TVR O	RVR O	Progres	Oktober		November		Desember	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
BAD Pelayan an publik kepada industri Prasarana Internal	002 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	8.529.552.000	8.437.227.627 (98,92%)	480 industri	506 industri	100 %	23	8,33	26	8,33	131	8,37
	022 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	748.607.000	715.561.691 (95,59%)	31 industri	53 industri	100 %	0	8,33	0	8,33	24	8,37
	034 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	653.979.000	635.640.679 (97,20%)	240 industri	261 industri	100 %	10	8,33	32	8,33	22	8,37
	055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	122.632.000	121.484.731 (99,06%)	5 industri	26 industri	100 %	0	8,33	0	8,33	22	8,37
	056 - Jasa pelayanan inspeksi teknis Pencegahan Pencemaran Industri	28.668.000	26.201.182 (91,40%)	10 industri	37 industri	100 %	0	8,33	0	8,33	28	8,37
	057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	841.444.000	835.627.269 (99,31%)	18 industri	50 Industri	100 %	0	8,33	5	8,33	40	8,37
	096 - Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	31.424.000	31.422.528 (99,995%)	15 industri	49 Industri	100 %	0	8,33	0	9,33	39	7,37
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	013 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	2.020.890.000	2.017.886.616 (99,85%)	45 unit	28 unit	99,99%	1	5	5	5	18	19,99
Total	Target Keuangan usulan ke BSKJI 99,81%	Rp. 13.412.106.000	13.234.115.651 (98,67%)									

(Sumber : Aplikasi SAKTI)

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang didalamnya mencakup pelaksanaan/operasional pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri meliputi penyelenggaraan jasa pelayanan teknis pengujian, pelayanan teknis kalibrasi, pelayanan teknis sertifikasi, pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis, pelayanan verifikasi industri, pelayanan uji profisiensi, pelayanan optimasi pemanfaatan teknologi, pemeliharaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian berupa pelaksanaan kegiatan akreditasi/surveillance/reakreditasi, pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/workshop/layanan, Sosialisasi dan diseminasi layanan teknis serta publikasi layanan jasa teknis.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan/operasional layanan seperti diantaranya belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan layanan (sampling, audit sertifikasi, supervisi kerjasama Optek, bimbingan dan pendampingan teknis dan verifikasi industri), belanja jasa (pemeliharaan akreditasi lembaga Penilaian Kesesuaian, biaya kalibrasi peralatan, pengujian Subkon, sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi peralatan untuk sampling, transport Limbah B3) serta belanja barang dan barang persediaan (pembelian bahan kimia dan bahan penolong, pengadaan peralatan gelas, perlengkapan sampling, penggantian sparepart peralatan dll).

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri terdiri dari 3 KRO yaitu AEF (Sosialisasi dan Diseminasi) , BAD (Pelayanan Publik kepada industri) dan CAH (Sarana Bidang Industri dan Perdagangan).

- KRO AEF (Sosialisasi dan Diseminasi)

KRO ini terdiri dari 1 RO yaitu sosialisasi dan diseminasi layanan teknis pencegahan pencemaran industri. Dimana target fisik 200 orang dan tercapai 286 orang.

Sampai Triwulan IV total realisasi keuangan 94,98 %. Masih di bawah target keuangan yang diusulkan satker BBSPJPPI ke eselon I.

Realisasi dari KRO ini adalah

- 1) Pelaksanaan *Business Gathering* tanggal 11 Desember 2025.
- 2) Pembuatan video testimoni Klien.
- 3) Pembelian rak brosur, meja pop up/polycounter big yang digunakan sebagai sarana pameran.
- 4) Pembuatan kalender 2026

- 5) Percetakan buku pelayanan teknis, banner, brosur, kartu nama 2 sisi, booklet layanan, buku company profil BBSPJPPI.
 - 6) Pembelian plakat akrilik kayu, seminar kit, souvenir, *doorprize* terkait acara *Business Gathering*.
 - 7) Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan Sosekbudkesmas di PT Pertamina RU IV Cilacap.
 - 8) Mengikuti pameran dalam rangka Exhibitor pada Halal Indonesia International Industry Expo di Tangerang.
 - 9) Mengikuti pameran AIGIS 2025 di Jakarta.
 - 10) Mengikuti pameran dalam rangka Indonesia 4.0 *conference & Expo 2025 " Smart Nation 2025: Building Stronger, Moving Faster Sustainability"* di Jakarta.
 - 11) Mengikuti pameran *3rd T-POMI 2025-Technologh&Talent Palm Oil Mill Indonesia Conference&Exhibition* di Bandung.
 - 12) Mengikuti undangan Embassy Republik Singapura sebagai peserta pada *Post-Course Workshop Single Country Training : Strategic Leadership and Public Governance* di Jakarta.
- KRO BAD (Pelayanan Publik kepada industri)

Pada KRO Pelayanan Publik kepada industri terdiri dari 7 RO. Dimana target fisik RO semua tercapai.

Sampai Triwulan IV total realisasi keuangan sebesar 98,60 %, tidak mencapai target keuangan yg diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi KRO ini antara lain :

 1. Perjalanan dinas semua jasa layanan balai.
 2. Pengadaan bahan kimia dan bahan penolong.
 3. Pelaksanaan asesmen LS Pro oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
 4. Pelaksanaan witness LSSM oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
 5. Mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi LPH di Bogor.
 6. Mengikuti rapat kerja Pusat Industri Halal di Surakarta.
 7. Melakukan studi banding LPK Halal ke Bogor.
 8. Mengikuti Bimtek Sertifikasi ISPO ke Jakarta.
 9. Melakukan konsultasi usulan PCP dengan Embassy Korea.
 - CAH (Sarana Bidang Industri dan Perdagangan)

Pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan terdiri dari satu RO. Dimana target

pengadaan 45 unit terealisasi 28 unit.

Sampai Triwulan IV, realisasi keuangan sebesar 99,85%, mencapai target keuangan yg diusulkan satker ke eselon I (99,81%).

Realisasi fisik pengadaan ini antara lain :

1. Pengadaan termohigrometer ruangan 3 buah.
2. Pengadaan centrifuge 1 buah.
3. Pengadaan surber net 2 buah
4. Pengadaan Van Dorn Horizontal Water Sampler 2 buah
5. Pengadaan well water sampler 2 buah
6. Pengadaan current meter 2 buah.
7. Pengadaan pH meter benchtop 1 buah
8. Pengadaan pH meter portable 1 buah
9. Pengadaan portable high performance zero air system 1 buah.
10. Pengadaan portable gas calibrator 1 buah
11. Pengadaan incubator BOD 1 buah.
12. Pengadaan lemari asam 1 buah.
13. Pengadaan heating mantle 2 buah
14. Pengadaan hotplate multi position 1 buah
15. Pengadaan anti vibration bench 2 buah
16. Pengadaan lemari bahan kimia anti korosi 1 buah.
17. Pengadaan ORP 1 buah
18. Pengadaan chart recorder 1 buah.
19. Pengadaan showcase 2 pintu 2 buah

Sampai Triwulan IV Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan sebesar 98,67 % tidak mencapai target keuangan yang diusulkan satker ke eselon I.

b) Kendala

1. KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi
 - Pada kegiatan *Business Gathering* terdapat 4 (empat) narasumber, terdiri atas 2 (dua) narasumber dari Kementerian Perindustrian dan 2 (dua) narasumber dari industri. Dalam perencanaan awal, narasumber dari industri direncanakan setara eselon II, namun pada pelaksanaannya diwakilkan oleh staf dengan jabatan setara eselon IV.

2. KRO 6077.BAD Pelayanan Publik kepada Industri

- Perjalanan dinas layanan kalibrasi yang tidak terserap optimal dikarenakan adanya efisiensi operasional perjalanan dinas di PLN NP Sengkang, PLN NP Punagaya dan Pertamina RU IV – RCA 0528.
- Anggaran pengujian subkon masih tersisa dikarenakan saat pengajuan anggaran masih menggunakan tarif lama laboratorium ALS. Pada pertengahan jalan, berganti menggunakan laboratorium AAS (Anugrah Analisis Sempurna) dimana tarif lebih murah. Sisa anggaran tidak bisa dialihkan ke MAK lain dikarenakan anggaran masuk pada revisi pemanfaatan saldo.

3. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

- Masih adanya blokir efisiensi anggaran (Kode A) untuk belanja modal peralatan uji dan peralatan pendukung laboratorium serta sarana ruang pelayanan

c) Tindak Lanjut

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Masing-masing koordinator kegiatan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran serta melakukan identifikasi atas potensi anggaran yang tidak terserap.
- Identifikasi potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi di setiap kegiatan.

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah :

- Pada pelaksanaan anggaran tahun berikutnya, khususnya pada periode akhir tahun anggaran, perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada setiap kegiatan. Selanjutnya, sisa anggaran tersebut dapat direalokasikan untuk mendukung optimalisasi kinerja penyerapan anggaran.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

a. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24 : Kegiatan II Realisasi Fisik dan Keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan s/d September	TVRO	RVRO	Progres	Oktober		November		Desember	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	103.528.000	98.097.414 (94,75%)	1 layanan	1 layanan	100	0	8,33	0	8,33	1	8,37
	962 - Layanan Umum	65.292.000	56.087.916 (85,90%)	1 layanan	1 layanan	100	0	8,33	0	8,33	1	8,37
	994 - Layanan Perkantoran	21.122.470.000	21.007.886.961 (99,46%)	1 layanan	1 layanan	100%	0	8,33	0	8,33	1	8,37
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951 - Layanan Sarana Internal	201.735.000	201.501.496 (99,88)	90 unit	41 unit	99,99	0	5	0	5	2	39,99
	Layanan prasarana internal	0	0	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	0
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	954 - Layanan Manajemen SDM	35.871.000	31.125.342 (86,77%)	107 orang	123 orang	100	9	8,33	9	8,33	24	8,37
	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	382.407.000	381.034.411 (99,64%)	55 orang	123 orang	100	0	8	0	8	69	8
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	45.906.000	28.637.736 (62,38%)	2 dokumen	2 dokumen	100	0	8,33	0	8,33	1	8,37

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan s/d September	TVRO	RVRO	Prog res	Oktober		November		Desember	
							RV RO	Prog res	RV RO	Prog res	RV RO	Prog res
Industri	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44.061.000	31.150.390 (70,70%)	2 dokumen	2 dokumen	100	0	8.33	0	8.33	1	8.37
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	103.798.000	103.142.810 (99,37%)	2 dokumen	2 dokumen	74,97	0	8.33	0	22,33	1	8.37
	961 - Layanan Reformasi Kinerja	6.115.000	4.439.399 (72,60 %)	2 dokumen	2 dokumen	74,97	0	8.33	0	8.33	2	8.37
Total	Target Keuangan 99,81%	Rp. 22.111.183.000	Rp.21.943.103.875 (99,24%)									

(Sumber Aplikasi SAKTI)

Sampai Triwulan IV total realisasi keuangan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebesar 99,24 % dibawah dari target keuangan usulan satker ke eselon I tetapi diatas target keuangan BSKJI..

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen yang didalamnya mencakup pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana prasarana, perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, pengelolaan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi serta pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja keperluan perkantoran, belanja gaji dan honor (operasional satuan kerja, honor output kegiatan, honorarium karyawan kontrak) belanja barang persediaan (pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga perkantoran), biaya langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet), perjalanan dinas (perjadin pimpinan), belanja pemeliharaan sarpras, belanja jasa (pemeliharaan SMM balai, maintenance jaringan, biaya pelatihan teknis SDM) serta belanja modal (pengadaan sarpras perkantoran, pengembangan sistem informasi, pembangunan/renovasi

Gedung dan Bangunan).

Pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri terdapat 4 (empat) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari tiga RO.

Sampai Triwulan IV total realisasi keuangan sebesar 99,39 % , tidak mencapai sasaran yang diusulkan satker ke eselon I tetapi diatas target keuangan BSKJI.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Honorarium Tenaga Kontrak, uang makan tenaga kontrak dan BPJS tenaga kontrak.
- Pembayaran listrik, medical check up, air PDAM, gallon air minum ,obat-obatan.
- Pembayaran gaji, tunjangan kinerja , uang makan ASN.
- Pembayaran jasa outsourcing tenaga keamanan, tenaga kebersihan
- Pengadaan bahan makanan minuman penambah daya tahan tubuh.
- Pembayaran belanja perawatan aplikasi dan jaringan IT.

2. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdiri dari dua RO, dimana 1 RO layanan prasarana internal terkena blokir.Target 91 unit dan tercapai 41 unit.

Sampai Triwulan IV total realisasi keuangan sebesar 99,88%, telah mencapai sasaran.yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah realisasi :

- Pengadaan 24 buah kursi kerja
- Pengadaan AC 2 PK sebanyak 5 buah.
- Pengadaan smart TV 43 inch sebanyak 2 buah.
- Pengadaan meja kubikal isi 4 sebanyak 6 buah.
- Pengadaan AC 1 PK sebanyak 1 buah.
- Pengadaan smart TV 55 inch sebanyak 1 buah.
- Pengadaan kursi pimpinan rapat sebanyak 2 buah.

3. KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Pada KRO Layanan Manajemen SDM Internal terdiri dari dua RO.

Sampai Triwulan IV total realisasi keuangan sebesar 98,54%, tidak mencapai sasaran yang diusulkan satker ke eselon I..

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

- Honorarium rohaniawan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional.
- Memfasilitasi pelatihan deteksi bakteri vibrio, shigella, legionella dan streptococcus dari sampel air bersih atau air limbah.
- Memfasilitasi Bimtek dan pelatihan Tata Cara Perhitungan TKDN tanggal 13 Januari 2025.
- Fasilitas pelatihan fungsional arsiparis ketrampilan Angkatan I.
- Mengikuti rapat koordinasi klaim AK JF Keuangan PKN STAN 2022 di Bogor.
- Fasilitas CPNS 2025 dalam rangka PKBT di Jakarta dan Yogyakarta
- Fasilitas pelatihan verifikasi metode pengujian mikrobiologi tanggal 29-30 Oktober 2025
- Fasilitas bimbingan teknis inventarisasi dan kuantifikasi emisi gas rumah kaca (GRK) tanggal 13 Juni 2025.
- Fasilitas pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi ke BBSPJ Industri Kulit, Karet dan Plastik.
- Mengadakan pelatihan inhouse training verifikasi metodologi pengujian mikrobiologi.
- Memfasilitasi bimbingan teknis auditor teknologi industri di Jakarta.
- Mengikuti workshop penyusunan skema CLSP
- Memfasilitasi studi banding LVV ke Surabaya.
- Memfasilitasi studi turu kalibrasi H VAS di PT HAS.
- Fasilitas pelatihan *Certified Internal Audit Officer* (CIAO).
- Memfasilitasi Kegiatan internalisasi asesor kompetensi LSP BBSPJPPI.

4. KRO 6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari 4 RO.

Sampai Triwulan IV total realisasi keuangan sebesar 83,74% , tidak mencapai sasaran yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Penyusunan dan penyampaian Laporan triwulan PP 39 dan LAKIP sesuai batas waktu.
- Koordinasi tindak lanjut hasil audit kinerja di Jakarta
- Mengikuti bimbingan teknis pelaporan kinerja di Jakarta.
- Koordinasi dokumen keuangan di Jakarta.
- Koordinasi BMN dan evaluasi bantuan alat laboratorium furniture di Yogyakarta.
- Koordinasi pertanggungjawaban keuangan BLU 2025 di Jakarta

- Pelaksanaan reviu RKA-KL TA 2026
- Pelaksanaan audit laporan keuangan BLU oleh Kantor Akuntan Publik
- Perjalanan dinas dalam rangka workshop penyusunan laporan keuangan dan BMN

b. Kendala

1. KRO 6042 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengelolaan dan penilaian karsipan dikarenakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan internal BSKJI sebagian besar dilaksanakan secara online.
2. KRO 6042 EBB Layanan Sarana Internal
 - Adanya blokir efisiensi anggaran pada layanan sarana dan prasarana internal sehingga tidak terrealisasi.
3. KRO 6042 EBC Layanan Manajemen SDM Internal
 - Perjalanan dinas dalam rangka pembekalan pegawai purna tugas realisasi keuangan rendah dikarenakan pada saat perjalanan dinas sharing operasional dengan pegawai lain.
4. KRO 6042 EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - Realisasi anggaran pada kegiatan perencanaan dan penganggaran ; pemantauan dan evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi kinerja yang masih rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan internal BSKJI sebagian besar dilaksanakan secara online.

c. Tindak Lanjut

Apabila diproyeksikan terdapat anggaran pada komponen kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Kinerja yang tidak terealisasi akan dilakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang membutuhkan tambahan alokasi anggaran untuk mendorong optimalisasi penyerapan anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

- a. Terkait dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai *Net Promoter Score* (NPS) terdapat kendala masih rendahnya partisipasi pelanggan dalam pengisian kuesioner (pengisian dan pengembalian kuesioner oleh pelanggan jumlahnya rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar).

- b. Terkait indikator kinerja persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) terdapat kendala belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan. Selain itu parameter uji yang disubkontrak ke laboratorium lain hampir semua melebihi SPM laboratorium (SPM > 14 hari).
- c. Terkait indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) terdapat kendala perubahan kebijakan penerapan diklat fungsional di masing-masing unit Pembina termasuk di dalamnya ketidakpastian jadwal.
- d. Terkait dengan indikator tingkat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) terdapat kendala belum adanya petunjuk teknis terkait dengan penjelasan butir revisi LKE penerapan SPBE.
- e. Terkait dengan indikator indeks pelayanan publik adalah kesulitan memutakhirkan data SP4N Lapor dan SIPPN karena adanya kendala akses ke akun yang disediakan.
- f. Terkait dengan sasaran kegiatan tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) terdapat kendala yaitu Aplikasi SRIKANDI sering error sehingga input surat masuk melalui Srikandi agak terlambat. Disamping itu, belum semua SDM yang terkait kearsipan telah memahami penggunaan aplikasi Srikandi khususnya untuk surat keluar.
- g. Terkait indikator kinerja nilai minimal indikator kinerja pelaksanaan anggaran tidak tercapai karena Nilai Belanja Kontraktual rendah (hanya 50 dari 100). Hal ini dikarenakan BBSPJPPI mendaftarkan kontrak RM non *inaproc* mendekati akhir tahun sehingga nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak rendah.
- h. Terkait dengan sasaran kegiatan meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri dengan indikator persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah terdapat kendala yaitu keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri serta masih adanya blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.

3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Dalam pelaksanaan output kegiatan triwulan IV TA 2025 masih terdapat beberapa kendala antara lain

- Berkaitan dengan pelaksanaan Business Gathering
Honorarium narasumber masih belum terserap optimal dikarenakan pada kegiatan *Business Gathering* terdapat 4 (empat) narasumber, terdiri atas 2 (dua) narasumber dari Kementerian Perindustrian dan 2 (dua) narasumber dari industri. Dalam perencanaan awal, narasumber dari industri direncanakan setara eselon II, namun pada pelaksanaannya diwakilkan oleh staf dengan jabatan setara eselon IV.
- Berkaitan dengan perjalanan dinas kalibrasi
Perjalanan dinas layanan kalibrasi yang tidak terserap optimal dikarenakan adanya efisiensi operasional perjalanan dinas di PLN NP Sengkang, PLN NP Punagaya dan Pertamina RU IV – RCA 0528.
- Berkaitan dengan biaya pengujian pihak lain
Anggaran pengujian subkon masih tersisa dikarenakan saat pengajuan anggaran masih menggunakan tarif lama laboratorium ALS. Dimana pada pertengahan jalan berganti menggunakan laboratorium AAS (Anugrah Analisis Sempurna) dimana tarif lebih murah.
- Berkaitan dengan pengadaan peralatan fasilitas laboratorium /workshop/layanan dan layanan sarana dan prasarana internal.
Realisasi pengadaan tidak mencapai target yang ditetapkan karena sebagian anggaran terkena blokir efisiensi.
- Berkaitan dengan perjalanan dinas yang belum terserap optimal karena sebagian besar pelaksanaan secara *online/daring*

3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT

3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kinerja TA 2025 selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *Net Promoter Score* (NPS), diperlukan strategi intensif dalam menghimpun isian kuesioner. Strategi tersebut antara lain dengan dilakukan blasting kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran serta pada sistem SINDI dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.
2. Terkait persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* dengan cara memonitoring proses layanan pengujian jika ada keterlambatan segera diselesaikan dan

memberitahukan informasi tersebut kepada pelanggan. Disamping itu, perlu dilakukan perluasan ruang lingkup Laboratorium BBSPJPPI melalui pengembangan parameter uji yang selama ini disubkontrakkan, sebagai upaya mengurangi ketergantungan subkontrak ke laboratorium lain serta meningkatkan kemandirian layanan laboratorium.

3. Terkait indikator kinerja IP ASN perlu mengoptimalkan *Inhouse Training* dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi serta mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.
4. Terkait indikator kinerja tingkat penerapan SPBE perlu dilakukan diskusi, bimbingan serta mengikuti kegiatan yang terkait SPBE dengan Pusdatin terkait pedoman teknis penerapan SPBE.
5. Terkait indeks pelayanan publik yaitu menyampaikan kembali kendala akses ke BSKJI untuk akun SP4NLapor dan SIPPN.
6. Terkait nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) perlu koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menjajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI
7. Terkait nilai IKPA, pendaftaran kontrak sebaiknya diawal tahun agar tidak berpengaruh pada komponen penilaian IKPA di bagian Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak.
8. Terkait dengan pengukuran indikator persentase penggunaan produk dalam negeri, perlu dilakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN serta Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.

3.3.2 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan kinerja kegiatan TA 2025 sebagai berikut :

- Masing-masing koordinator kegiatan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja berikut rencana penyerapan anggaran
- Apabila diproyeksikan terdapat anggaran yang tidak terealisasi maka dilakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang membutuhkan tambahan alokasi anggaran.
- Terkait subkontrak pengujian, dilakukan perbandingan biaya dengan laboratorium pengujian lain. Selain itu, dilakukan pengembangan parameter yang selama ini disubkontrakkan agar pengujian dapat dilaksanakan secara mandiri di Laboratorium BBSPJPPI.

BAB. IV

P E N U T U P

4.1 Realisasi Kegiatan

Berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV Tahun 2025, sebagian besar indikator kinerja telah tercapai. Namun demikian, terdapat satu indikator kinerja yang belum tercapai, yaitu Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan oleh rendahnya nilai Belanja Kontraktual, yang hanya mencapai 50 dari target 100. Kondisi ini terjadi karena pendaftaran kontrak RM non-Inaproc oleh BBSPJPPI dilakukan mendekati akhir tahun anggaran, sehingga berdampak pada rendahnya nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak.

Sementara itu dari sisi pelaksanaan anggaran, pada tahun 2025 telah dilakukan revisi anggaran pada DIPA BBSPJPPI sebanyak 15 kali dengan jumlah pagu pada DIPA sesuai hasil revisi terakhir Rp 40.465.963.000, terdiri dari anggaran Rupiah Murni senilai Rp 18.991.891.000 dan anggaran PNBPN tahun berjalan sebesar Rp. 21.474.144.000,-. Dari sisi kinerja layanan jasa teknis, realisasi penerimaan PNBPN tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 20.483.355.953, atau tercapai 109,62% melebihi target penerimaan PNBPN tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 18.686.000.000.

Adapun kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2025 realisasi anggaran BBSPJPPI mencapai sebesar Rp 35.173.183.417, atau 99,014% dari total pagu efektif anggaran DIPA revisi terakhir. Realisasi tersebut terdiri atas penyerapan anggaran dari sumber Rupiah Murni sebesar Rp17.335.122.831 atau 99,45%, serta dari sumber PNBPN sebesar Rp17.838.060.586 atau 98,59%. Capaian penyerapan anggaran tersebut belum tercapai apabila dibandingkan dengan usulan realisasi anggaran satker BBSPJPPI yang disampaikan kepada BSKJI, namun telah tercapai apabila dibandingkan dengan target realisasi anggaran BSKJI secara keseluruhan.

Meskipun demikian, secara umum capaian fisik kegiatan tahun 2025 telah tercapai 100% dimana sebagian besar target dalam DIPA melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat target pada KRO sarana bidang industri dan perdagangan serta layanan sarana dan prasarana yang tidak tercapai karena terkena blokir anggaran.

4.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Triwulan IV Tahun 2025 masih menghadapi sejumlah kendala pada beberapa indikator utama. Pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* dan juga *Nilai Net Promoter Score (NPS)*, kendala utama yang dihadapi adalah tingkat pengembalian kuesioner yang rendah dibandingkan dengan jumlah kuesioner yang disebar. Selain itu, penyajian data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi secara terpusat dan masih tersebar di masing-masing bagian teknis, sehingga tidak seluruh populasi pelanggan dapat dijangkau untuk diberikan survei. Pada indikator *jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*, terdapat tantangan berupa meningkatnya persaingan dengan kompetitor yang menawarkan layanan sejenis dengan harga lebih rendah, serta adanya sebagian pelanggan yang beralih ke laboratorium lain khususnya pada layanan pengujian. Di sisi lain, meskipun telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji Profisiensi, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, serta penjualan produk AiMS, capaian jumlah pelanggan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kompetensi dan ruang lingkup layanan BBSPJPPI, meskipun berbagai upaya promosi telah dilakukan. Selanjutnya, pada indikator *persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)*, khususnya pada layanan pengujian, kendala yang dihadapi antara lain adanya permintaan pelanggan untuk penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) yang menunggu data rata-rata debit pada awal bulan berikutnya, adanya parameter uji yang harus disubkontrakkan ke laboratorium lain dengan standar waktu pelayanan lebih dari 14 hari, serta kendala teknis berupa kerusakan peralatan dan keterlambatan pengadaan bahan kimia. Pada layanan kalibrasi, khususnya pada bulan November, terdapat pengulangan data kalibrasi pada beberapa pekerjaan yang diindikasikan adanya data menyimpang sehingga memerlukan waktu tambahan. Sementara itu, pada layanan sertifikasi, kendala terjadi akibat adanya perubahan dokumen legalitas perusahaan yang harus disesuaikan sehingga memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan. Selain itu, pada pekerjaan one stop service yang menggabungkan audit SNI dan ISO, perbedaan SLA masing-masing skema serta permintaan perusahaan agar audit dilakukan secara bersamaan untuk menyelaraskan siklus audit turut mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian layanan.

Selain indikator-indikator tersebut, hambatan juga dihadapi pada *Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)*. Kendala yang muncul antara lain jenis dan tingkat pendidikan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi belum sepenuhnya berada pada jenjang dengan bobot penilaian maksimal sesuai ketentuan IPASN. Di samping itu, pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) belum dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan karena keterbatasan kuota dari

penyelenggara. Perubahan kebijakan terkait penerapan diklat fungsional pada masing-masing unit pembina, termasuk penjadwalan yang belum pasti, turut mempengaruhi optimalisasi pengembangan kompetensi ASN.

Pada indikator *tingkat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)*, belum adanya petunjuk teknis terkait dengan penjelasan butir reviu LKE penerapan SPBE. Selanjutnya, pada indikator *indeks pelayanan publik* terdapat kesulitan dalam memutakhirkan data SP4NLapor dan SIPPN akibat kendala akses terhadap akun yang disediakan. Pada indikator *nilai minimal pengawasan kearsipan internal (unit kearsipan)* terdapat penambahan indikator penilaian yaitu digitalisasi dan TTE yang penilaiannya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi SRIKANDI.

Pada indikator *nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*, kendala yang dihadapi antara lain adanya penambahan volume output Rincian Output (RO) pada saat revisi pergeseran anggaran sebagai dampak penerapan kebijakan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), yang berpotensi menyebabkan sebagian target output tidak tercapai. Selain itu, terdapat penolakan atas usulan revisi anggaran karena adanya penambahan pagu perjalanan dinas untuk mendukung operasional layanan yang tidak sejalan dengan kebijakan pembatasan perjalanan dinas dalam masa efisiensi. Kendala lainnya adalah penyusunan rencana penarikan dana pada Triwulan IV yang belum optimal, seiring adanya revisi relaksasi dan revisi optimalisasi setelah pengajuan revisi pemutakhiran Halaman III DIPA Triwulan IV Tahun 2025, sehingga masih berpotensi menimbulkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana yang telah dimutakhirkan. Selain hal tersebut, nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak yang termasuk dalam Nilai Belanja Kontraktual pada indikator IKPA tergolong rendah yaitu 50 dari 100. Hal ini disebabkan BBSPJPPI mendaftarkan kontrak RM non *inaproc* mendekati akhir tahun.

Dari sisi aspek kinerja anggaran, realisasi anggaran BBSPJPPI belum memenuhi target realisasi keuangan sesuai prognosa realisasi yang diusulkan satker kepada sekjen. Realisasi keuangan tercapai 99,014%, sedangkan target 99,81%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perjalanan dinas layanan kalibrasi tidak terserap optimal akibat adanya efisiensi operasional perjalanan dinas di PLN NP Sengkang, PLN NP Punagaya dan Pertamina RU IV – RCA 0528. Selain itu, terdapat sisa anggaran pada pengujian subkontrak karena pada pertengahan pelaksanaan terjadi peralihan penyedia laboratorium ke laboratorium AAS dengan biaya pengujian yang lebih rendah.

Pada kegiatan *Business Gathering* terdapat 4 (empat) narasumber, terdiri atas 2 (dua) narasumber dari Kementerian Perindustrian dan 2 (dua) narasumber dari industri. Dalam perencanaan awal, narasumber dari

industri direncanakan setara eselon II, namun pada pelaksanaannya diwakilkan oleh staf dengan jabatan setara eselon IV

Untuk kegiatan perjalanan dinas koordinasi pengawasan LPK , perencanaan dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi masih terdapat sisa anggaran karena sebagian besar acara dilakukan secara online.

4.3 Saran dan Tindak Lanjut

Terkait indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* dan juga *Nilai Net Promoter Score (NPS)*, tindak lanjut yang dilakukan difokuskan pada peningkatan tingkat respons pelanggan melalui berbagai strategi, antara lain mendorong pengisian kuesioner secara langsung oleh pelanggan yang datang ke BBSPJPPI saat pengantaran sampel uji, melakukan blasting WhatsApp dan email secara lebih intensif dan terjadwal, serta memperkuat komunikasi dan sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. Selain itu, Platform SINDII direncanakan sebagai sarana pengisian kuesioner sebelum pelanggan mengunduh laporan hasil uji, serta pemberian kuesioner kepada pelanggan layanan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan Penyelenggara Uji Profisiensi setelah pelaksanaan audit atau verifikasi. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa tingkat respons pelanggan masih relatif rendah, platform SINDII belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian kuesioner, sosialisasi melalui media sosial belum optimal, serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi secara terpusat. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan diarahkan pada penyusunan tampilan kuesioner yang lebih menarik, optimalisasi pemanfaatan platform SINDII, penjadwalan sosialisasi kuesioner secara rutin setiap awal bulan, serta penyusunan basis data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu, termasuk pengembangan database berbasis nomor order layanan.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk indikator *Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*, diarahkan pada peningkatan daya tarik dan jangkauan layanan melalui penguatan promosi dengan berpartisipasi dalam berbagai pameran, optimalisasi promosi melalui kanal media BBSPJPPI, perluasan ruang lingkup pengujian terakreditasi, serta penguatan kapasitas layanan melalui kerja sama subkontrak dan kolaborasi dengan balai lain. Upaya lain dilakukan dengan memperkuat hubungan dengan calon pelanggan layanan baru, termasuk konsultan independen pada layanan verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal, serta mendorong seluruh pegawai berperan sebagai agen promosi dalam pelaksanaan layanan. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa meskipun BBSPJPPI telah mengikuti berbagai pameran dan melakukan tindak lanjut kepada pengunjung stan serta menjalankan promosi media

sesuai jadwal, hasil yang diperoleh belum optimal. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan difokuskan pada tindak lanjut calon pelanggan secara berkala, antara lain melalui blasting promosi layanan, serta finalisasi revisi tarif agar jasa layanan BBSPJPPI lebih kompetitif dan mampu meningkatkan jumlah pelanggan.

Terkait indikator *Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)*. Tindak lanjut difokuskan pada penguatan pengelolaan proses layanan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi. Pada layanan pengujian, dilakukan koordinasi dengan tim SINDII untuk penambahan kode khusus atas permintaan pelanggan agar tidak dikategorikan melebihi SPM, peningkatan kompetensi laboratorium melalui pelatihan dan inventarisasi kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan subkontrak, serta mitigasi risiko terhadap peralatan uji berusia lebih dari 10 tahun dan keterlambatan pengadaan bahan kimia. Pada layanan kalibrasi, dilakukan monitoring peralatan standar dan pendukung guna memastikan kinerja peralatan dan kepatuhan petugas terhadap SOP. Sementara itu, pada layanan sertifikasi, tindak lanjut diarahkan pada pengecekan dan pemastian kelengkapan dokumen sejak tahap permohonan serta pemisahan evaluasi teknis pada kegiatan sertifikasi SNI dan ISO 9001:2015 agar sesuai dengan SLA masing-masing. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa koordinasi penambahan kode contoh khusus di SINDII telah dilakukan, laboratorium mulai mempersiapkan perluasan parameter pengujian, serta penerapan prioritas peremajaan peralatan uji. Untuk layanan sertifikasi, kelengkapan dokumen permohonan terus diperkuat dan evaluasi teknis terpisah mulai diterapkan. Rencana perbaikan ke depan mencakup penambahan kode contoh "4" pada aplikasi SINDII untuk permintaan khusus pelanggan, pengadaan bahan dan peralatan guna memperluas parameter pengujian dengan prioritas pengadaan AAS Flame–GF pada tahun 2026, serta penguatan koordinasi melalui aplikasi SIINAS agar kelengkapan dokumen dan pelaksanaan rapat teknis sertifikasi dapat berjalan sesuai SLA masing-masing kegiatan.

Tindak lanjut indikator *Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)* difokuskan pada penguatan pengembangan kompetensi ASN melalui koordinasi dengan manajemen dan penyelenggara pelatihan, monitoring ketersediaan anggaran, serta optimalisasi inhouse training dan pelatihan daring. Selain itu, dilakukan evaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai dan simulasi progres perhitungan IPASN. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya dampak perubahan regulasi perhitungan IPASN dan perpindahan jabatan ke JFT, keterbatasan kuota dan anggaran pelatihan PKN, PKA, dan diklat fungsional, serta penyesuaian jadwal pelatihan akibat relaksasi anggaran. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan diarahkan pada keberlanjutan pemberian izin tugas belajar mandiri, penguatan koordinasi dengan unit pembina jabatan

fungsional, penyesuaian jadwal pelatihan sesuai postur anggaran, serta pemastian setiap pegawai memperoleh minimal satu pelatihan teknis setiap tahun.

Terkait *Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah evaluasi teknis penerapan SPBE di lingkungan BBSPJPPI serta koordinasi lebih lanjut dengan Pusdatin terkait pedoman teknis penerapan SPBE. Pada *Indeks Pelayanan Publik*, diperlukan pengecekan akun SP4NLapor dan SIPPN secara berkala agar pemutakhiran data dapat dilakukan ketika aplikasi tidak mengalami gangguan.

Sementara itu, pada indikator *Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)*, diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan yang fokus pada pengoperasian aplikasi SRIKANDI. Selain itu, seluruh surat yang telah ditandatangani, baik dengan tanda tangan basah maupun TTE, wajib disampaikan ke arsiparis untuk diunggah ke dalam aplikasi SRIKANDI.

Sedangkan *Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*, tindak lanjut strategis dilakukan melalui koordinasi dengan BSKJI, Biro Perencanaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran terkait kebijakan penetapan Rincian Output SBKK dan pengelolaan blokir anggaran, khususnya untuk kegiatan layanan jasa teknis serta mendaftarkan kontrak RM sebagai nilai belanja kontraktual di awal tahun berjalan. Sebagai rencana perbaikan, akan dilakukan reviu pelaksanaan kegiatan dan prognosis penyerapan anggaran secara periodik minimal setiap triwulan, serta penguatan koordinasi dengan BSKJI agar pelaksanaan revisi terpusat selaras dengan jadwal pemutakhiran Halaman III DIPA. Selain itu, untuk mendaftarkan kontrak RM maksimal di Triwulan II tahun berjalan.

Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, masing-masing koordinator kegiatan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja dan rencana penyerapan anggaran, serta melakukan identifikasi dini terhadap potensi anggaran yang tidak terserap.

Selain itu, perlu dilakukan rapat evaluasi secara periodik guna memantau realisasi dan sisa anggaran setiap kegiatan. Selanjutnya, pada periode akhir tahun anggaran, tim pengelola keuangan BBSPJPPI dapat melakukan identifikasi atas potensi sisa anggaran yang tidak terealisasi pada masing-masing kegiatan untuk kemudian dilakukan realokasi anggaran, dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja penyerapan anggaran.

Terkait subkontrak pengujian, dilakukan perbandingan biaya dengan laboratorium pengujian lain. Selain itu, dilakukan pengembangan parameter yang selama ini disubkontrakkan agar pengujian dapat dilaksanakan secara mandiri di Laboratorium BBSPJPPI.

LAMPIRAN

RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

Unit Organisasi : BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI Pencegahan Pencemaran Industri

N o.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	25%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	50%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II.	75%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III	100%	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4) Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Des-25
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW I	50%	1)Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW II	75%	1)Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW III	100%	1)Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW IV.		
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	88 Persen	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan	75%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan	100%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholidi S), Ketua Tim Kerja Standarisasi,Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho)	Des-25
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	40 Nilai	25%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan	50%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan	75%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan	100%	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan		
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 Indeks	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI2) Pembuatan	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI2) Pembuatan	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI2) Pembuatan	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI2) Pembuatan	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)	Des-25
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500 Hasil Layanan	25%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	75%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.		
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,50 Persen	25%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inv	50%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU2) Melakukan im	75%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbahul Anam)	Des-25
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	59 Persen	25%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan up	50%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan u	75%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional		
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	25%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	50%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.	75%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.	100%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW IV.	Ketua Kelompok Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Agung B)	Des-25
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKII	20 Persen	25%	1) Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan y	50%	1) Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKII. 2) Pengembangan Sistem Informasi 3) Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	75%	1) Uji Coba Integrasi Sistem 2) Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem 3) Evaluasi dan Perbaikan Sistem	100%	1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem2) Penyempurna		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
	2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77 Persen	25%	1) Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2) Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3) Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi	50%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	75%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	100%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas		
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 Indeks	30%	1) Mengevaluasi/mereview nilai IPP Tahun sebelumnya. 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDII. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5) Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6) Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin	50%	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI	75%	1) Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2) Update website secara berkala 3) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6) Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI	100%	1) Update website secara berkala 2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan		
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	60 Persen	15%	1) Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2) Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1) Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1) Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor Itjen 3) Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4) Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5) Koordinasi dengan Tim Auditor Itjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	100%	1) Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Des-25
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	70.10 Nilai	25%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.	50%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan	75%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III. 2) Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.	100%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. 2) Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. 3) Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto)	Des-25
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79.45 Nilai	30%	1) Penyusunan dokumen Tapkin 2) Penyusunan dokumen Renkin 3) Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4) Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5) Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itje	60%	1) Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2)Penyiapan dokumen tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1) Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)	100%	1) Pelaksanaan movev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	Des-25
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,40 Nilai	25%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DiPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4) Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5) Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.	50%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DiPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	75%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DiPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	100%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DiPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbahul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75 Nilai	25%	1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Desember tahun sebelumnya 5) Mendukung pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahunan	50%	1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Audited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan April dan Mei tahun berjalan	75%	1) Menyusun laporan keuangan semester I (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Juni, Juli dan Agustus tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan penilaian laporan keuangan tahunan (Audited) oleh Biro Keuangan	100%	1) Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September, Oktober, dan November tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan 6) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	Des-25
8	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah	81 Persen	30%	1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri	50%	1) Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	75%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	100%	1) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) .	Des-25



Rencana AKSI triwulan IV

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dari Target	Capaian	Triwulan IV		% Fisik		Realisasi			Kendala	Tindak lanjut yg bersifat strategis	Penanggung Jawab
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	Bulan Oktober	Bulan November	Bulan Desember			
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 Indeks	3,70 Indeks	100,54%	100%	1) Penanganan dan pemantauan complain/keluhan pelanggan TW IV 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4) Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan.	100%	100%	1) Penyebaran kuesioner kepada 125 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 20 responden. 2) Hasil analisa IKM bulan Oktober berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,76 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Oktober sebesar 3,70.	1) Penyebaran kuesioner kepada 128 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 24 responden. 2) Hasil analisa IKM bulan November berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,73 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan November sebesar 3,70.	1) Penyebaran kuesioner kepada 128 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 60 responden. 2) Hasil analisa IKM bulan Desember berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017 adalah sebesar 3,70 dengan nilai indeks IKM Januari sampai dengan Desember sebesar 3,70. 3) Jumlah responden total Januari-Desember 2025 : 308 Responden.	1. Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey IKM. 2. Belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis), sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey IKM.	Melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mau mengisi kuesioner sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan <i>feedback</i> yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan <i>blasting</i> wa dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. Platform SINDII bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana pelanggan untuk mengisi kuesioner sebelum mengunduh laporan hasil uji. Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, kuesioner dapat diberikan setelah pelaksanaan audit audit maupun verifikasi.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	960 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	1063 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi	110,73%	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW IV.	100%	100%	Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Oktober 2025: a) Pengujian = 448 b) Kalibrasi = 56 c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 14 d) Sertifikasi = 207 e) Inspeksi Teknis = 0 f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 3 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 37 j) LPH = 10	Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan November 2025: a) Pengujian = 485 b) Kalibrasi = 67 c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 14 d) Sertifikasi = 243 e) Inspeksi Teknis = 0 f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 8 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 37 j) LPH = 55	Jumlah Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi yang memanfaatkan layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Desember 2025: a) Pengujian = 506 b) Kalibrasi = 73 c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 23 d) Sertifikasi = 261 e) Inspeksi Teknis = 0 f) Konsultasi (penyusunan pertek) = 50 g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 37 j) LPH = 62	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil	1. Meningkatkan promosi dengan ikut serta di berbagai pameran 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Memperkuat kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Memperkuat hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI 5. Melakukan kerjasama dengan balai lain 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia 7. Seluruh pegawai bisa menjadi agen pemasaran dan promosi bersamaan saat melakukan jasa layanan	
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	88 Persen	94,23 %	107,080	100%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV.	100%	100%	Pengujian: 97,37% Kalibrasi : 100%	Pengujian: 93,3% Kalibrasi: 99,7%	Pengujian: 99,3% kalibrasi : 100 %	Pengujian : 1. Ada permintaan dari pelanggan untuk diberikan kode khusus, sehingga tidak dianggap melebihi SPM. 2. Ada parameter uji yang disubkontrak ke laboratorium lain, dimana SPM laboratorium tersebut lebih dari 14 hari. 3. Ada kendala kerusakan peralatan dan keterlambatan bahan kimia. kendala Kalibrasi: 1. Pelanggan	Pengujian : 1. Kendala 1 : Karena permintaan pelanggan, maka di sistem Sindi perlu diberikan kode khusus, sehingga tidak dianggap melebihi SPM. 2. Kendala 2 : Laboratorium BBSPJPPI mulai mempelajari parameter uji yang disubkontrak agar tidak perlu disubkontrakkan lagi. 3. Kendala 3 : Melakukan mitigasi resiko dari peralatan-peralatan yang sudah lebih dari 10 tahun, dan pengadaan bahan kimia yang perlu indent lebih dari 30 hari. Kalibrasi ; 1. penambahan pada sistem disindi terkait revisi, sehingga saat dilakukan revisi karena permintaan pelanggan sistem tidak akan melihat sebagai proses yg keluar dari SLA	Ketua Kelompok Kerja Pengujian dan Kalibrasi (Cholid S), Ketua Tim Kerja Standardisasi, Sertifikasi, Inspeksi dan Verifikasi Industri (M. Syarifudin Edy Nugroho), Ketua Tim Kerja Kalibrasi Instrumen dan Lingkungan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dari Target	Capaian	Triwulan IV		% Fisik		Realisasi			Kendala	Tindak lanjut yg bersifat strategis	Penanggung Jawab
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	Bulan Oktober	Bulan November	Bulan Desember			
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	40 Nilai	63 Nilai	157,5 %	100%	1) Penyebaran kuesioner kepada 125 pelanggan dan 2) Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW IV.	100%	100%	1) Penyebaran kuesioner kepada 128 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 24 responden, sehingga secara akumulatif sudah 224 responden dengan rincian promoters sebanyak 153 pelanggan, passives 63 pelanggan dan detractors 8 pelanggan. 2) Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Oktober 2025 adalah sebesar 65.	1) Penyebaran kuesioner kepada 128 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 24 responden, sehingga secara akumulatif sudah 248 responden dengan rincian promoters sebanyak 168 pelanggan, passives 72 pelanggan dan detractors 8 pelanggan. 2) Hasil analisa NPS sampai dengan bulan November 2025 adalah sebesar 65.	1) Penyebaran kuesioner kepada 128 pelanggan dan kembali kepada BBSPJPPI sejumlah 60 responden, sehingga secara akumulatif sudah 308 responden dengan rincian promoters sebanyak 204 pelanggan, passives 94 pelanggan dan detractors 10 pelanggan. 2) Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebesar 63.	1. Sulitnya mencari responden yang mau mengisi survey NPS. 2. Belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis), sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey NPS.	Melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi survey NPS sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan feedback yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan blasting wa dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. Platform SINDII bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana pelanggan untuk mengisi survey NPS sebelum mengunduh laporan hasil uji. Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, survey NPS diberikan setelah pelaksanaan audit audit maupun verifikasi.	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 Indeks	3 indeks	100%	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.	100%	100%	1) Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik (layanan stasioner dan layanan dinamis) 2) Pada bulan Oktober 2025, telah tercapai 172 dokumen (dokumen penawaran dan surat layanan lainnya) yang tersampaikan kepada pelanggan 3) Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telepon dan WA (pelayanan prima)	1) Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik (layanan stasioner dan layanan dinamis) 2) Pada bulan November 2025, telah tercapai 155 dokumen (dokumen penawaran dan surat layanan lainnya) yang tersampaikan kepada pelanggan 3) Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telepon dan WA (pelayanan prima)	1) Promosi/penyebarluasan informasi layanan jasa melalui website, media social, leaflet dan desk layanan publik (layanan stasioner dan layanan dinamis) 2) Pada bulan Desember 2025, telah tercapai 158 dokumen (dokumen penawaran dan surat layanan lainnya) yang tersampaikan kepada pelanggan 3) Untuk menjaga kesetiaan pelanggan dilakukan komunikasi yang efektif melalui telepon dan WA (pelayanan prima)	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil	1. Melakukan pemenuhan gap kompetensi yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar 2. Promosi lebih gencar lagi melalui media sosial, konsultasi gratis via zoom, dan pertemuan offline. 3. Promosi gencar terhadap layanan baru agar mendapatkan klien lebih banyak	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri (Dyah AF)
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	7.500 Hasil Layanan	8574 Hasil Layanan Perhitungan di G46	114,32%	100%	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.	100%	100%	Jumlah hasil layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Oktober 2025: a) Pengujian = 5640 LHU b) Kalibrasi = 534 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 121 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 232 sertifikat/ hasil surveilen e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 3 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 104 j) LPH = 13	Jumlah hasil layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan November 2025: a) Pengujian = 6504 LHU b) Kalibrasi = 661 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 134 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 264 sertifikat/ hasil surveilen e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 50 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 134 j) LPH = 13	Jumlah hasil layanan BBSPJPPI sampai dengan bulan Desember 2025: a) Pengujian = 7078 LHU b) Kalibrasi = 723 LHU c) Bimbingan dan Pendampingan Teknis = 151 sertifikat/ laporan d) Sertifikasi = 284 sertifikat/ hasil surveilen e) Inspeksi Teknis = 0 laporan f) Konsultansi (penyusunan pertek) = 50 laporan g) teknologi proses dan mesin (peralatan aims) = 1 h) RBP (desain IPAL) = 1 i) Verifikasi TKDN = 166 j) LPH = 71	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil	1. Meningkatkan promosi dengan ikut serta di berbagai pameran 2. Memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi 3. Memperkuat kemampuan layanan melalui kerjasama subkon 4. Memperkuat hubungan kepada calon pelanggan dengan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI 5. Melakukan kerjasama dengan balai lain 6. Megoptimalkan kegiatan promosi layanan melalui kanal media yang tersedia 7. Seluruh pegawai bisa menjadi agen pemasaran dan promosi bersamaan saat melakukan jasa layanan	Ketua Tim Kerja Pemasaran dan Kemitraan (Dyah AF)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dari Target	Capaian	Triwulan IV		% Fisik		Realisasi			Kendala	Tindak lanjut yg bersifat strategis	Penanggung Jawab
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	Bulan Oktober	Bulan November	Bulan Desember			
		3. Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	14,50 Persen	15,90%	109,66%	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	100%	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan 3) melakukan penghitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan 3) melakukan penghitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan 3) melakukan penghitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku	Sampai dengan Triwulan III penerimaan BLU masih dibawah target rata-rata bulanan	1. melakukan penagihan piutang 2. segera melakukan penagihan terhadap pekerjaan yang sudah selesai 3. segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PDDM	Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam)
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	59 Persen	61,46 Persen	104,17 %	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100%	100%	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional"	Pada tahun 2025 terjadi penurunan Pendapatan Jasa Layanan Teknis satu K/L		Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam)
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 indeks	82,1 Indeks	100,98 %	100%	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM IV.	100%	100%	1) Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran 2) Pembaruan Informasi Pendidikan & Pelatihan Pegawai 3) Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional 4) Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (1. Sosialisasi Aspek Riset dan Inovasi Pada Perhitungan TKDN dan BMP 2025; 2. Training on GHG Emissions and Removal Calculation for Industrial Sector; 3.	1) Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran 2) Pembaruan Informasi Pendidikan & Pelatihan Pegawai 3) Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional (1. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 1; 2. Pelatihan Sistem Industri I Angkatan 5) 4) Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (1. Bimbingan Teknis Audit Teknologi Industri; 2. Bimbingan	1) Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran 2) Pembaruan Informasi Pendidikan & Pelatihan Pegawai 3) Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional 4) Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi (1. Diklat & Sertifikasi Audit Internal Keuangan; 2. Internalisasi Asesmen Kompetensi CLSP; 3. Pelatihan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); 4. Pelatihan	1) Jenis tingkat pendidikan SDM yang diperlukan organisasi tidak pada tingkatan dengan bobot maksimal 2) Pelatihan PKN & PKA belum memperoleh Kuota dari Penyelenggara sesuai Jadwal kebutuhan 3) Perubahan Kebijakan Penerapan Diklat Fungsional di masing-masing unit pembina termasuk penjadwalan yang tidak pasti	1) Koordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2025 2) Monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar 3) Koordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara PKN & PKA 4) Mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi 5) Mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat 6) Mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai	Ketua Kelompok kerja Kepegawaian (Agung B)
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	20 Persen	100 %	100%	1) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2) Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi 3) Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem 4) Monitoring dan evaluasi	100%	100%	1) Melakukan perbaikan dalam sistem integrasi internal menyesuaikan dengan manual API SIPPT 5.0 2) Melakukan evaluasi sistem informasi terintegrasi dengan memverifikasi data yang terkirim ke SIPPT dengan data internal sesuai dengan petunjuk manual API SIPPT versi 5.0	1) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak BSKJI terkait hasil integrasi data layanan ke SIPPT untuk data terkirim per Triwulan III dengan hasil akurat keseluruhan data transaksi penerimaan BLU OM-SPAN sebesar 71,36% 2) Melakukan verifikasi serta crosscheck data yang terintegrasi SIPPT dengan data penerimaan BLU	1) mengevaluasi Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Layanan Publik Satker UPT BSKJI Triwulan 3 Tahun 2025 2) Melakukan verifikasi serta crosscheck data yang terintegrasi SIPPT dengan data penerimaan BLU		1) Melakukan optimalisasi arsitektur integrasi	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dari Target	Capaian	Triwulan IV		% Fisik		Realisasi			Kendala	Tindak lanjut yg bersifat strategis	Penanggung Jawab
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	Bulan Oktober	Bulan November	Bulan Desember			
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77 Persen	88,81 Persen	115,34 %	100%	1) Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2) Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	100%	100%	1) Melakukan pengumpulan bukti dukung penilaian LKE SPBE dari 3 aspek (tata kelola, manajemen dan layanan) 2) Melakukan penyusunan bukti dukung penilaian LKE SPBE	1) Melakukan pembahasan internal bukti dukung penilaian LKE SPBE 2) Melakukan pengisian LKE SPBE 3) Konsultasi dengan Pusdatin terkait bukti dukung LKE SPBE 4) Melakukan perbaikan dan melengkapi bukti dukung hasil konsultasi dengan pusdatin 5) Mengunggah bukti dukung dan LKE SPBE ke akun lemon	1) Mengikuti pembahasan penilaian sementara perjakin SPBE dengan Pusdatin 2) Melakukan klarifikasi hasil penilaian sementara dan konsultasi perbaikan bukti dukung LKE SPBE dengan Pusdatin 3) Memperbaiki dokumen bukti dukung LKE SPBE 4) Mengunggah revisi bukti dukung dan LKE SPBE ke akun lemon	1) Belum adanya petunjuk teknis terkait dengan penjelasan butir reviu LKE penerapan SPBE	1) Evaluasi teknis terkait penerapan SPBE di	
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 indeks	4,95 indeks	107,14	100%	1) Update website secara berkala 2) Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3) Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4) Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5) Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanaka	100%	100%	1) Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar 3) Memutakhirkan konten SIPPN dan website 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik) 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada	1) Meninjau dan memperbaiki bukti dukung IPP dari saran perbaikan dari pihak BSKJI 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar 3) Memutakhirkan konten SIPPN dan website 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik) 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan	1) memutakhirkan bahan tayang elektronik dan non elektronik 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar 3) Memutakhirkan konten SIPPN dan website 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik) 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan	Kesulitan memutakhirkan data SP4NLapor dan SIPPN karena adanya kendala akses ke akun yang disediakan	Menyampaikan kembali kendala akses ke BSKJI untuk akun SP4NLapor dan SIPPN	
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	60 Persen	100 Persen	166,67	100%	1) Koordinasi dengan Setitjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	100%	100%	1) Monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan penyampaian bukti dukung tindak lanjut oleh masing-masing Penanggung Jawab tindak lanjut 2) Penyampaian kelengkapan bukti tindak lanjut hasil pengawasan TA 2024 pada satker BBSPJPPI kepada Inspektorat Jenderal sesuai surat Kepala BBSPJPPI Nomor R/165 /BBSPJPPI/PR/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 3) Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja dengan Tim auditor Inspektorat III	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada satker BBSPJPPI TA 2024 sesuai surat Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor R/180/U-IND/PW/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025		tidak ada kendala	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dari Target	Capaian	Triwulan IV		% Fisik		Realisasi			Kendala	Tindak lanjut yg bersifat strategis	Penanggung Jawab
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	Bulan Oktober	Bulan November	Bulan Desember			
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan	70,10	86,47	123,35	100%	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. 2) Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. 3) Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian pengawasan Kearsipan TA 2024 4) Peningkatan kompetensi Arsiparis (Diklat/Bimteks/Workshop/S emnas, dll)	100%	100%	1) Pengelolaan arsip meliputi: 1.1) Pengendalian Naskah Dinas: • Registrasi Arsip Masuk = 140 • Registrasi Arsip Keluar = 486 1.2) Penggunaan Arsip (aktif & inaktif) = 2 pelayanan 1.3) Pemeliharaan Arsip • Daftar Arsip Aktif = 43 berkas (479 arsip) • Daftar Arsip In Aktif = 8 berkas (101 arsip) • Alih media Arsip Dinamis = 10 berkas (96 arsip) 1.4) Penyusutan Arsip:	1) Pengelolaan arsip meliputi: 1.1) Pengendalian Naskah Dinas: • Registrasi Arsip Masuk = 126 • Registrasi Arsip Keluar = 509 1.2) Penggunaan Arsip (aktif & inaktif) = 2 pelayanan 1.3) Pemeliharaan Arsip • Daftar Arsip Aktif = 30 berkas (471 arsip) • Daftar Arsip In Aktif = 25 berkas (401 arsip) • Alih media Arsip Dinamis = 9berkas (102 arsip) 1.4) Penyusutan Arsip:	1) Pengelolaan arsip meliputi: 1.1) Pengendalian Naskah Dinas: • Registrasi Arsip Masuk = 110 • Registrasi Arsip Keluar = 433 1.2) Penggunaan Arsip (aktif & inaktif) = 2 pelayanan 1.3) Pemeliharaan Arsip • Daftar Arsip Aktif = 45 berkas (480 arsip) • Daftar Arsip In Aktif = 56 berkas (467 arsip) • Alih media Arsip Dinamis = 8 berkas (107 arsip) 1.4) Penyusutan Arsip:	Nilai hasil pengawasan Kearsipan turun dibanding tahun lalu, diperkirakan karena: 1). Ada penambahan indikator penilaian seperti tingkat digitalisasi. 2). TTE yang diakui hanya yg melalui aplikasi SRIKANDI. 3). Selama ini surat keluar dikelola oleh bagian masing2 dan tidak disampaikan ke arsiparis sehingga sangat terbatas surat keluar yang diupload	1). Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan khususnya pengelola SRIKANDI terkait Diklat Fungsional Kearsipan & diklat Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik 2) Menempatkan 1 orang arsiparis/ pengelola kearsipan yg fokus mengoperasikan SRIKANDI 3) Seluruh draft surat keluar harus disampaikan & diverifikasi arsiparis, surat yg sudah dittd (baik ttd basah maupun TTE)" juga wajib disampaikan ke arsiparis untuk diupload di SRIKANDI.	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto) ibu rahayu
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45	83,6	105,22	100%	1) Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	100%	100%	1) Penyusunan dan penyampaian dokumen Laporan PP 39 Triwulan III 2025 sesuai Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 151/BBSPJPPI/PR/X/2025 tanggal 7Oktober 2025 2) Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sdOktober 2025 3) Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan Oktober 2025 4) Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan Oktober 2025 pada aplikasi	1) Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sd November 2025 2) Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan November 2025 3) Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan November 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas 4) Penyusunan matriks tindak lanjut LHE SAKIP pada satker BBSPJPPI	1) Pengumpulan dan updating data capaian target indikator kinerja Perkin sd Desember 2025 2) Pengisian dan updating data capaian rencana aksi Perkin sd bulan Desember 2025 3) Pengisian dan updating data capaian kinerja sd bulan Desember 2025 pada aplikasi eMonev Bappenas 4) Penyusunan draft Laporan PP 39 Tw IV 2025 5) Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Terdapat perbedaan pelaporan capaian data kinerja layanan pada masing-masing Tim Kerja	1) Review dan penyesuaian SOP Pengumpulan Data (SOP Matriks Data Kinerja Layanan) 2) Pelaporan data capaian kinerja aspek layanan secara terpusat/satu pintu melalui Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri 3) Koordinasi dengan Pokja Informasi dan Digitalisasi untuk pengembangan dashboard kinerja	Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggran IKPA	93,40	90,92	97,34 %	100%	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4) Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	100%	100%	1) Penyampaian usulan Rencana Penarikan Dana Periode Tw IV 2025 oleh Tim Pengelola Keuangan BBSPJPPI 2) Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Hal III DIPA Tw IV 2025 ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jateng sesuai surat KPA BBSPJPPI Nomor S-147/BBSPJPPI/PR/X/2025 tanggal 3 Oktober 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 3 Oktober 2025	1) Pengajuan usulan revisi kewenangan Kanwil dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran sesuai surat KPA BBSPJPPI Nomor S-216/BBSPJPPI/PR/XI/2025 tanggal 14 November 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 17 November 2025	1) Pengajuan usulan revisi kewenangan KPA dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran sesuai surat KPA BBSPJPPI Nomor B-230/BBSPJPPI/PR/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025. Pengesahan DIPA revisi pada 12 Desember 2025	1) Penambahan volume output RO saat revisi pergeseran anggaran dikarenakan penerapan kebijakan SBKK yang menyebabkan terdapat potensi capaian output yang tidak tercapai 2) Penolakan usulan revisi dikarenakan pada usulan revisi terdapat penambahan pagu perjalanan dinas untuk operasional layanan yang tidak sesuai dengan	Koordinasi dengan BSKJI, Birocana dan DJA terkait kebijakan penetapan RO SBKK dan penetapan blokir anggaran khususnya untuk RO yang bersifat/ untuk kegiatan layanan jasa teknis	Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok kerja Program (Kukuh Aryo W)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dari Target	Capaian	Triwulan IV		% Fisik		Realisasi			Kendala	Tindak lanjut yg bersifat strategis	Penanggung Jawab
						Target Antara	Rencana Kegiatan	Target	Realisasi	Bulan Oktober	Bulan November	Bulan Desember			
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75 Nilai	94,75 Nilai	126,33 %	100%	1) Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September, Oktober, dan November tahun berjalan 5) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan 6) Mendukung pelaksanaan	100%	100%	1) Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September tahun berjalan 4) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan	1) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 2) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 3) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Oktober tahun berjalan 4) Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan	1) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 2) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 3) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan November tahun berjalan 4) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan	1) Ketidaksiapan dokumen arsip dan data keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan audit dan penyusunan LK 2) Melakukan koordinasi antara penyusun LK, operator persediaan dan approver persediaan untuk menghindari adanya selisih waktu yang lebih dari 60 hari antara tanggal buku dan tanggal approve 2) Selisih Waktu Tanggal Buku dengan Tanggal Approve untuk lebih dari 4 Transaksi Persediaan melebihi batas waktu 60 hari sehingga mengurangi nilai LK	1) Menyiapkan arsip keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan audit dan penyusunan LK 2) Melakukan koordinasi antara penyusun LK, operator persediaan dan approver persediaan untuk menghindari adanya selisih waktu yang lebih dari 60 hari antara tanggal buku dan tanggal approve	Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam)
8	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81 Persen	97,51 persen	110,81 %	100%	1) Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam	100%	100%	1) Melakukan Pengadaan yang merupakan PDN, seperti : Belanja barang, konsumsi rapat, Pembayaran Listrik, Pengujian ke Pihak Lain, Kalibrasi, dan Perjalanan Dinas 2) Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN. 3) Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri. 4) Pembayaran kontrak bulan Oktober 2025 tenaga	1) Melakukan Pengadaan yang merupakan PDN, seperti : Belanja barang, konsumsi rapat, Pembayaran Listrik, Pengujian ke Pihak Lain, Kalibrasi, dan Perjalanan Dinas 2) Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN. 3) Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri. 4) Pembayaran kontrak bulan November 2025	1) Melakukan Pengadaan yang merupakan PDN, seperti : Belanja barang, konsumsi rapat, Pembayaran Listrik, Pengujian ke Pihak Lain, Kalibrasi, dan Perjalanan Dinas 2) Mengutamakan pengadaan dengan barang-barang bersertifikat TKDN. 3) Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri. 4) Pembayaran kontrak bulan Desember 2025	1) Kebutuhan langganan aplikasi berbayar dari luar negeri (zoom) 2) Dilakukan blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.	1) Mencari referensi aplikasi berbayar yang dibutuhkan dan berasal dari dalam negeri. 2) Mengajukan relaksasi anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.	Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanyoto), Ketua Kelompok Kerja Keuangan (Misbakhul Anam)

Semarang, Januari 2026
 Plt Kepala BBSPPPI
 Apit Pria Nugraha

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVR O	RVRO	Progres	Oktober		November		Desember	
								RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
1	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	AEF Sosialisasi dan Diseminasi (orang)	013 Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri (orang)	200	286	100	0	5	0	5	286	40
2	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	002 Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	480	387	100	23	8,33	26	8,33	12	8,37
3	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	022 Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	31	53	100	0	8,33	0	8,33	24	8,37
4	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	034 Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	240	261	100	10	8,33	32	8,33	22	8,37
5	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	055 Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	5	26	100	0	8,33	0	8,33	22	8,37
6	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	056 Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	10	37	100	0	3	0	2	28	2
7	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	057 Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	18	50	100	0	8,33	5	8,33	40	8,37
8	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri (Industri)	096 Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri (Industri)	15	49	100	0	8,33	0	9,33	39	7,37
9	EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan (Unit)	013 Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri (Unit)	45	28	100	1	5	5	5	18	20
10	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1	1	100	0	8,33	0	8,33	1	8,37

No.	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Oktober		November		Desember	
								RVRO	Progres	RVRO	Progres	RVRO	Progres
11	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	962 Layanan Umum (Layanan)	1	1	100	0	8,33	0	8,33	1	8,37
12	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100	0	7,33	0	8,33	1	8,37
13	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	90	41	100	0	5	0	5	2	40
14	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	971 Layanan Prasarana Internal (Unit)	1	1	100	0	8,33	0	8,33	1	8,37
15	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	107	123	100	9	8,33	9	8,33	24	8,37
16	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	55	123	100	0	8	0	8	69	8
17	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	2	2	100	0	8,33	0	8,33	1	8,37
18	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	2	2	100	0	8,33	0	8,33	1	8,37
19	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	2	2	100	0	2,33	0	8,33	1	8,37
20	WA Program Dukungan Manajemen	6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	2	2	100	0	8,33	0	8,33	2	8,37



Kementerian PPN/
Bappenas



TRIWULAN IV
2025

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#247161

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun : 2025

K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UK. Eselon I: 07 - Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6042.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Layanan	1	0	333,528,000	98,097,414	29.41%							
1	051 Pengelolaan Data dan Informasi		1	1	333,528,000	98,097,414	29.41%	Selesai	layanan data dan informasi terkait jaringan IT, SINDII bulan Desember 2025	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	masih tergantung di pihak eksternal
6042.EBA.962 - Layanan Umum		Layanan	1	0	65,292,000	56,087,916	85.90%							
2	051 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Layanan	1	1	65,292,000	56,087,916	85.90%	Selesai	layanan tata usaha bulan Desember 2025	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
6042.EBA.994 - Layanan Perkantoran		Layanan	1	0	22,183,346,000	21,007,886,961	94.70%							
3	001 Gaji dan Tunjangan		1	9	16,501,120,000	16,414,389,576	99.47%	Selesai	pembayaran gaji dan tunjangan Desember 2025	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
4	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1	7	5,682,226,000	4,593,497,385	80.84%	Selesai	pembayaran operasional dan pembiayaan perkantoran Desember 2025	100.00		Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah
6042.EBB.951 - Layanan Sarana Internal		Unit	90	39	674,826,000	201,501,496	29.86%							
5	052 Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi		29	24	298,266,000	0	0.00%	Selesai	pelaksanaan pengadaan telah terselesaikan	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak semua bisa terrealisasi karena blokir anggaran

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
6	053 Pengadaan peralatan inventaris perkantoran		61	17	341,560,000	201,501,496	58.99%	Selesai	pengadaan smart TV 55 inch sebanyak 1 buah	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak semua pengadaan terbeli karena adanya efisiensi anggaran
7	051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional		1	0	35,000,000	0	0.00%	Selesai	tidak dibeli karena anggaran diblokir	100.00		Belum	Anggaran	masuk pada efisiensi anggaran (blokir)
6042.EBB.971 - Layanan Prasarana Internal		Unit	1	0	800,000,000	0	0.00%							
8	051 Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		1	0	800,000,000	0	0.00%	Selesai	tidak terlaksana karena anggaran diblokir	100.00		Belum	Anggaran	anggaran diblokir akibat dari efisiensi anggaran
6042.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM		Orang	107	99	238,935,000	31,125,342	13.03%							
9	051 Pengelolaan/Manajemen SDM		107	123	238,935,000	31,125,342	13.03%	Selesai	Semua pegawai ASN telah memanfaatkan fasilitasi dari kepegawaian	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
6042.EBC.996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan		Orang	55	54	473,349,000	381,034,411	80.50%							
10	051 Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		55	123	473,349,000	381,034,411	80.50%	Selesai	peningkatan dan pengembangan SDm Bulan Desember 2025	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
6042.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran		Dokumen	2	1	45,906,000	28,637,736	62.38%							
11	051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		2	2	45,906,000	28,637,736	62.38%	Selesai	penyelesaian revisi DIPA 15 (terakhir di tahun 2025)	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
6042.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Dokumen	2	1	44,061,000	31,150,390	70.70%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
12	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		2	2	44,061,000	31,150,390	70.70%	Selesai	penyusunan draft PP 39 TW IV	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
6042.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan		Dokumen	2	1	126,526,000	103,142,810	81.52%							
13	051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		2	2	126,526,000	103,142,810	81.52%	Selesai	1) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 2) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 3) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan November tahun berjalan 4) Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
6042.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja		Dokumen	2	0	32,144,000	4,439,399	13.81%							
14	051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		2	2	32,144,000	4,439,399	13.81%	Selesai	Pembuatan laporan SPIP dan SPI 2025 oleh tim penyusun pada SK	100.00		Sudah	Anggaran	Tidak ada masalah
6077.AEF.013 - Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Teknis Pencegahan Pencemaran Industri		orang	200	0	662,447,000	413,063,328	62.35%							
15	051 Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	orang	150	286	300,584,000	174,143,783	57.94%	Selesai	Telah dilaksanakan business gathering tanggal 11 Desember	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
16	052 Publikasi Layanan Jasa Teknis	Kegiatan	1	6	361,863,000	238,919,545	66.02%	Selesai	dikarenakan sudah akhir tahun, pameran sudah tidak ada yang diikuti tetapi dari target 1 pameran sudah terrealisasi	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
6077.BAD.002 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri		Industri	480	375	6,335,464,000	6,198,818,859	97.84%							
17	051 Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Industri	480	506	6,201,170,000	6,193,818,859	99.88%	Selesai	Pelaksanaan layanan pengujian bulan Desember 2025	100.00		Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah, semua komplain sudah terlaksana
18	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	Akreditasi	1	1	134,294,000	5,000,000	3.72%	Selesai	menunggu hasil akreditasi lab	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah, sudah terselesaikan perbaikannya
6077.BAD.022 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri		Industri	31	29	797,107,000	715,561,691	89.77%							
19	051 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	Industri	30	53	748,607,000	715,561,691	95.59%	Selesai	Pelaksanaan layanan kalibrasi desember 2025	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
20	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	Akreditasi	1	0	48,500,000	0	0.00%	Selesai	Belum terlaksana akreditasi kalibrasi karena sesuai jadwal di tahun 2026	100.00		Belum	Stakeholders Terkait (Eksternal)	tidak terlaksana dikarenakan jadwal akreditasi lab kalibrasi di tahun 2026
6077.BAD.034 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri		Industri	240	239	691,067,000	635,640,679	91.98%							


NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
21	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Lembaga Sertifikasi	Akreditasi	1	1	161,131,000	124,043,000	76.98%	Selesai	Sudah terlaksana akreditasi sertifikasi dan mendapat penghargaan sangat baik sebagai lembaga LSP	100.00		Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah
22	051 Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Industri	240	261	529,936,000	511,597,679	96.54%	Selesai	Pelaksanaan layanan sertifikasi bulan Desember 2025	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
	6077.BAD.055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	Industri	5	4	122,632,000	121,484,731	99.06%							
23	051 Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	industri	5	26	122,632,000	121,484,731	99.06%	Selesai	Pelaksanaan layanan bimtek bulan desember 2025	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
	6077.BAD.056 - Jasa pelayanan inspeksi teknis dan verifikasi industri Pencegahan Pencemaran Industri	Industri	10	9	28,668,000	26,201,182	91.40%							
24	051 Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	Industri	10	37	28,668,000	26,201,182	91.40%	Selesai	menindaklanjuti layanan tkdn bulan desember 2025	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
	6077.BAD.057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	Industri	18	10	376,682,000	370,865,829	98.46%							
25	051 Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	Industri	4	18	284,180,000	279,216,194	98.25%	Selesai	layanan konsultasi BBSPJPPI di Bulan Desember 2025	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah
26	052 Kolaborasi Pemanfaatan dan Penerapan Teknologi Industri	Industri	4	32	92,502,000	91,649,635	99.08%	Selesai	penyelesaian kolaborasi sertifikasi halal bulan Desember 2025	100.00		Sudah	Stakeholders Terkait (Eksternal)	Tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
	6077.BAD.096 - Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi Pencegahan Pencemaran Industri	Industri	15	10	31,424,000	31,422,528	100.00%							
27	051 Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi	Industri	15	49	29,924,000	29,922,528	100.00%	Selesai	pelaksanaan layanan uji profisiensi Bulan Desember 2025	100.00		Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah
28	052 Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Penyelenggara Uji Profisiensi	Akreditasi	1	1	1,500,000	1,500,000	100.00%	Selesai	sertifikat uji profisiensi sudah terbit	100.00		Sudah	Penerima Manfaat	Tidak ada masalah
	6077.CAH.013 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	Unit	45	10	3,614,415,000	2,017,886,616	55.83%							

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			FISIK Riil	Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres			Kategori	Keterangan
29	051 Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	Unit	38	28	3,614,415,000	2,017,886,616	55.83%	Selesai	1. Pengadaan termohigrometer ruangan 3 buah. 2. Pengadaan centrifuge 1 buah. 3. Pengadaan surber net 2 buah 4. Pengadaan Van Dorn Horizontal Water Sampler 2 buah 5. Pengadaan well water sampler 2 buah 6. Pengadaan current meter 2 buah. 7. Pengadaan pH meter benchtop 1 buah 8. Pengadaan pH meter portable 1 buah 9. Pengadaan portable high performance zero air system 1 buah. 10. Pengadaan portable gas calibrator 1 buah 11. Pengadaan incubator BOD 1 buah. 12. Pengadaan lemari asam 1 buah. 13. Pengadaan heating mantle 2 buah 14. Pengadaan hotplate multi position 1 buah 15. Pengadaan anti vibration bench 2 buah 16. Pengadaan lemari bahan kimia anti korosi 1 buah. 17. Pengadaan ORP 1 buah 18. Pengadaan chart recorder 1 buah. 19. Pengadaan showcase 2 pintu 2 buah.	100.00	Sudah		Tidak tercapai target dikarenakan sebagian anggaran terkena blokir	
												Anggaran		

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,

A Kepala Unit / Satuan Kerja BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI 



Apit Pria Nugraha



Kementerian PPN/
Bappenas



2025

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

